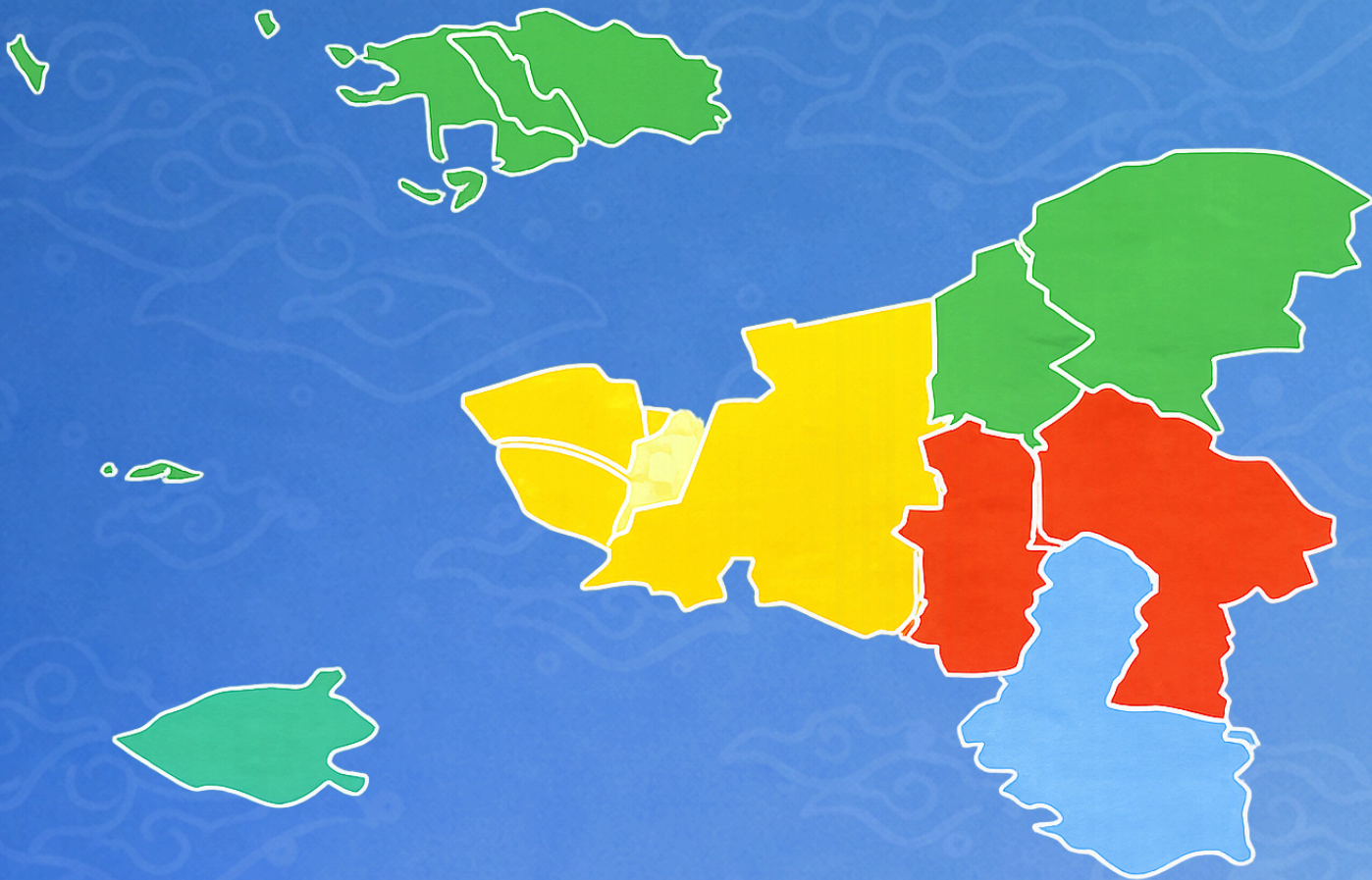


LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI BADAN PENGARAH PAPUA PERIODE BULAN JANUARI 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Bulan Januari Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, serta masukan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program strategis ke depan.

Selama periode Januari 2026, Badan Pengarah Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi fungsi pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

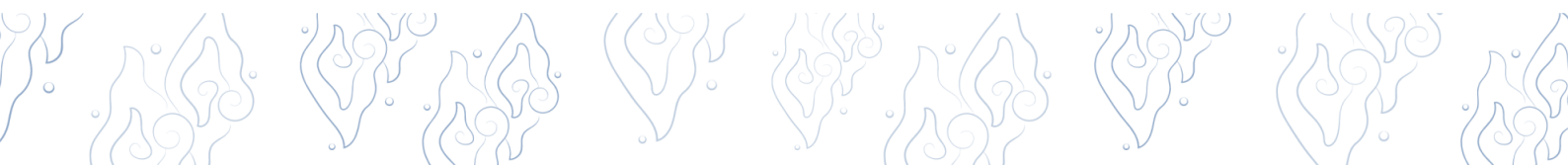
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua Barat Daya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.

Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 4 |
| 1.1 Dasar Hukum (Landasan)..... | 4 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.3 Ruang Lingkup..... | 5 |
| BAB II KELEMBAGAAN BPP..... | 7 |
| 2.1 Definisi BPP | 7 |
| 2.2 Tugas BPP | 7 |
| 2.3 Fungsi BPP..... | 7 |
| 2.4 Struktur BPP | 8 |
| BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI..... | 9 |
| 3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat..... | 9 |
| 3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas | 27 |
| 3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif..... | 31 |
| 3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai)..... | 63 |
| 3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi)..... | 69 |
| BAB IV CAPAIAN, PERMASALAHAN, TANTANGAN..... | 114 |
| 4.1 Capaian..... | 114 |
| 4.2 Permasalahan..... | 115 |
| 4.3 Tantangan | 116 |
| BAB V PENUTUP | 117 |
| 5.1 Kesimpulan | 117 |
| 5.2 Rekomendasi..... | 118 |
| 5.3 Penutup..... | 119 |

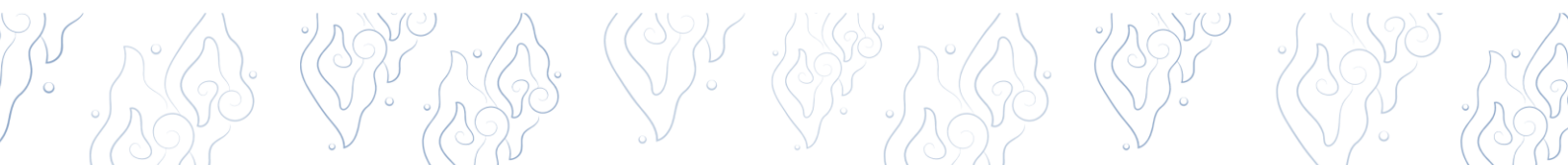


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum (Landasan)

- A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- D. Kelembagaan Badan Pengarah Papua
 1. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
 2. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
 3. Peraturan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
 4. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan BP3OKP.
 5. Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- E. Arah Kebijakan Pembangunan Papua
 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
 2. Buku Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029.
 3. Peraturan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua.



1.2 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Januari 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya, serta sebagai media dokumentasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan.

B. Tujuan

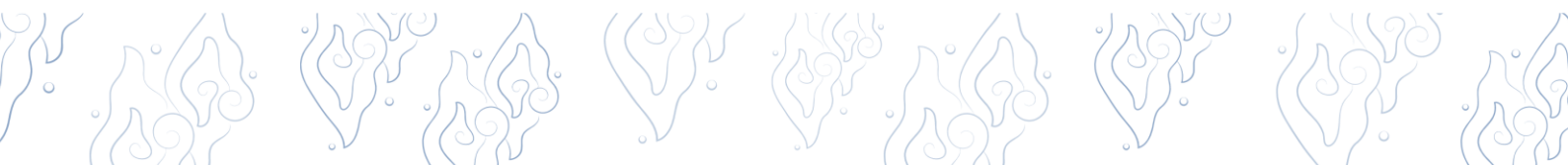
Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode Januari 2026.
2. Menggambarkan capaian, perkembangan, serta hasil kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam kerangka misi RIPP.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK Badan Pengarah.
4. Menyusun rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
5. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

1.3 Ruang Lingkup

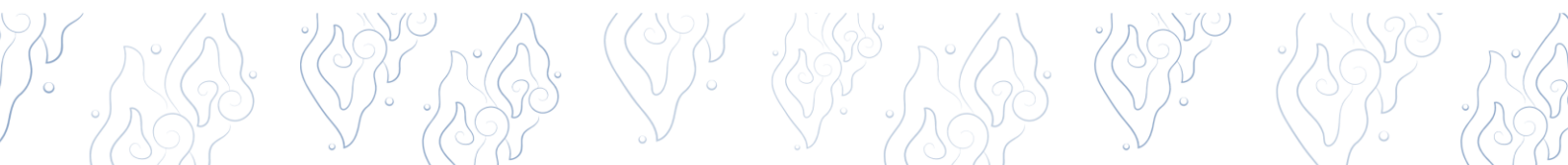
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Januari 2026 ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengarah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya selama periode 1–31 Januari 2026. Ruang lingkup laporan meliputi:

1. Pelaksanaan pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap kebijakan dan program percepatan pembangunan serta Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.



2. Pelaksanaan kegiatan strategis dalam kerangka misi RIPPP.
3. Capaian yang diperoleh selama periode pelaporan, termasuk hasil koordinasi dan rekomendasi yang dihasilkan.
4. Identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah.

Laporan ini disusun sebagai gambaran komprehensif atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode pelaporan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada periode berikutnya.



BAB II

KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA

2.1 Definisi BPP

1. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2: Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

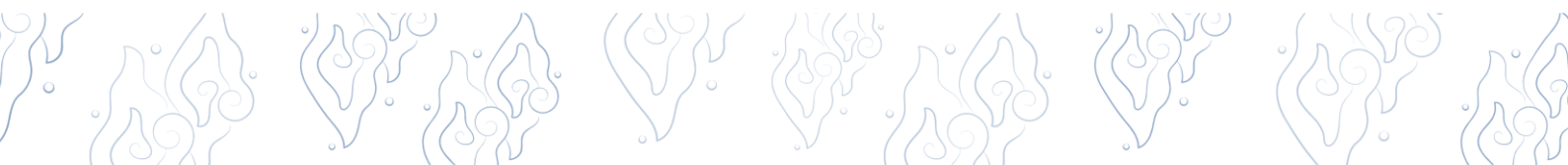
2.2 Tugas BPP

Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Fungsi BPP

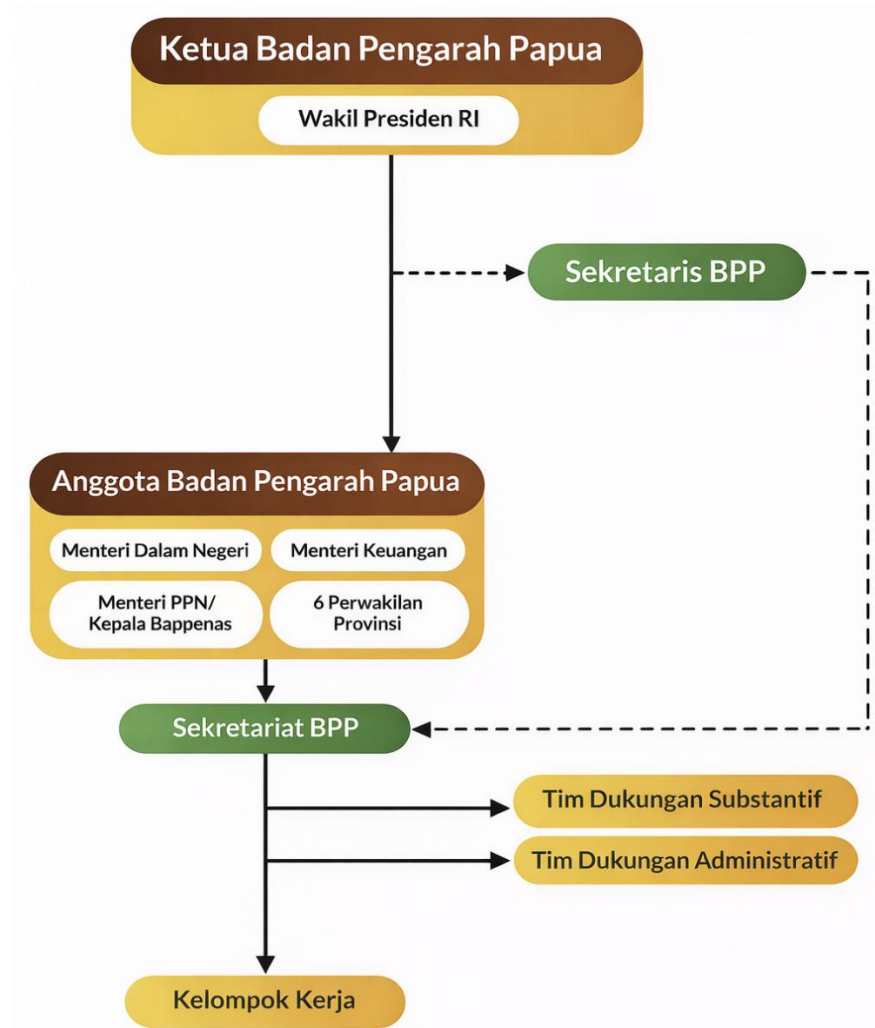
Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan



- percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
- c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

2.4 Struktur BPP



BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat

Kegiatan 1

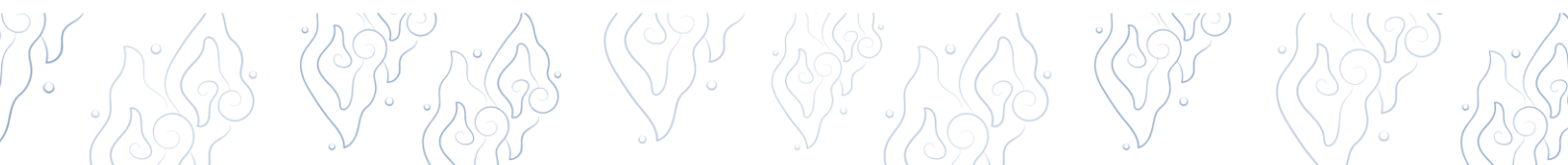
| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Pertemuan/Diskusi dengan Pihak Kampus Bhakta Wiyata |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Sabtu, 3 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | <p>Pelayanan kesehatan memerlukan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan (SDMK) yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mencukupi dari sisi jumlah. Upaya pemenuhan kebutuhan SDMK perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pendidikan dan kesehatan.</p> <p>Keterbatasan fiskal daerah saat ini mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam merencanakan program berdasarkan skala prioritas, termasuk dalam perencanaan pemenuhan SDMK. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan SDMK, sementara kemampuan penganggaran daerah belum dapat secara langsung memenuhi jumlah kebutuhan yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari peluang pembiayaan di luar APBD, baik melalui skema pembiayaan penuh maupun sebagian.</p> |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya dan Institut Ilmu Kesehatan (IIK) Bhakta Wiyata Kediri. 2. Melakukan sinkronisasi program rekrutmen calon mahasiswa di bidang kesehatan. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim PPMB IIK Bhakta Wiyata 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya 3. Pokja Sehat BP3OKP Papua Barat Daya |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat |

| | |
|---|---|
| <p>Poin-Poin Pembahasan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penawaran beasiswa dari IIK Bhakta Wiyata Kediri dengan skema pembiayaan 6 (enam) mahasiswa pembiayaan parsial dan 1 (satu) mahasiswa pembiayaan penuh. 2. Penyampaian beberapa program studi yang diusulkan untuk menerima beasiswa. 3. Tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya yang pada prinsipnya menyambut baik penawaran tersebut, namun saat ini pemerintah daerah masih memprioritaskan pendidikan dokter spesialis. |
| <p>Hasil Kegiatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya akan melakukan perencanaan terlebih dahulu terkait jumlah kebutuhan SDM. 2. Kepala Dinas Pendidikan tidak hadir dalam pertemuan sehingga tidak memberikan pendapat. |
| <p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p> | <p>Kepala Daerah disarankan untuk memanfaatkan peluang pembiayaan yang bersumber dari pihak ketiga, baik melalui beasiswa hibah maupun penawaran kerja sama dari perguruan tinggi, sebagai alternatif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan SDM.</p> |
| <p>Dokumentasi</p> |  |

Kegiatan 2

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Audiensi/Pertemuan bersama Wakil Walikota Sorong dan Tim/Staf |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 13 Januari 2026 Kantor Wakil Walikota Sorong |
| Latar Belakang | Terdapat permasalahan aset di Kota Sorong yang belum diserahkan dalam bentuk sertifikat dari pihak Kabupaten Sorong, sebagaimana hasil temuan KPK. Salah satu aset tersebut merupakan lokus yang direncanakan untuk persiapan pembangunan RS Siloam, yang selanjutnya akan dilakukan kunjungan koordinasi pada tanggal 4 Februari 2026. Selain itu, terdapat potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dioptimalkan melalui penataan dan kejelasan status aset dimaksud. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Wakil Walikota Sorong terkait permasalahan aset di Kota Sorong. 2. Melakukan koordinasi terkait persiapan pembangunan RS Siloam. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Walikota Sorong 2. Asisten II Kota Sorong 3. Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Sorong 4. BPP PBD |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat |
| Poin-Poin Pembahasan | Aset Kota Sorong yang belum diserahkan dalam bentuk sertifikat dari Kabupaten Sorong. Persiapan pertemuan dengan tim RS Siloam pada tanggal 4 Februari 2026. Status aset yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan RS Siloam. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direncanakan pertemuan lanjutan dengan Gubernur dan OPD terkait. 2. Dilakukan penelusuran status aset RS Siloam. 3. Dilakukan penelusuran status aset Kota Sorong. |

| | |
|--|---|
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pertemuan lanjutan dengan Gubernur dan OPD terkait.2. Menelusuri status aset RS Siloam bersama BPN dan Dinas Pertanahan Kota serta Kabupaten Sorong.3. Menelusuri status aset Kota Sorong bersama BPN dan Dinas Pertanahan Kota serta Kabupaten Sorong. |
| Dokumentasi |  |



Kegiatan 3

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Rapat Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Rumah Sakit Siloam di Dalam Aset Tanah Pemerintah Kota Sorong |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 20 Januari 2026 Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya |
| Latar Belakang | Rapat ini merupakan pertemuan lanjutan terkait penyelesaian permasalahan pembangunan Rumah Sakit Siloam yang masih terkendala kejelasan status aset tanah. Permasalahan tersebut memerlukan sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kepastian hukum dan kelanjutan pembangunan rumah sakit. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Melakukan sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan Rumah Sakit Siloam yang masih terkendala terkait kejelasan status aset tanah. |
| Peserta Kegiatan | Kegiatan dihadiri oleh Anggota BPP PBD, Pokja Sehat BPP PBD, Gubernur Papua Barat Daya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, BPN Kota dan Kabupaten Sorong, Dinas Pertanahan Kota Sorong, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Asisten II Kota Sorong, BPP, Wakil Walikota Sorong, serta OPD terkait. |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Evaluasi, dan Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat |
| Poin-Poin Pembahasan | Pembahasan difokuskan pada aset tanah milik Pemerintah Kota Sorong yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Rumah Sakit Siloam. Selain itu, dibahas pula mengenai 27 aset Kota Sorong yang belum diserahkan oleh Kabupaten Sorong dalam bentuk sertifikat, di mana baru 4 aset yang telah memiliki sertifikat dan telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong. |
| Hasil Kegiatan | Diketahui bahwa status aset tanah Rumah Sakit Siloam berupa sertifikat yang telah dipindahkan kepada pihak ketiga oleh Kabupaten Sorong saat dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kabupaten Sorong dan PT Pusat Bisnis Sorong, serta dijaminkan ke Bank Mandiri dengan nilai Rp144 miliar. |

| | |
|---|---|
| | <p>Selain itu, terhadap 27 aset Kota Sorong yang belum diserahkan dalam bentuk sertifikat, akan dilakukan penelusuran lebih lanjut dan difasilitasi agar dapat segera direalisasikan.</p> |
| <p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p> | <p>Melaksanakan pertemuan lanjutan dengan Bagian Hukum terkait status aset Rumah Sakit Siloam serta status 27 aset Kota Sorong lainnya.</p> |
| <p>Dokumentasi</p> |  |

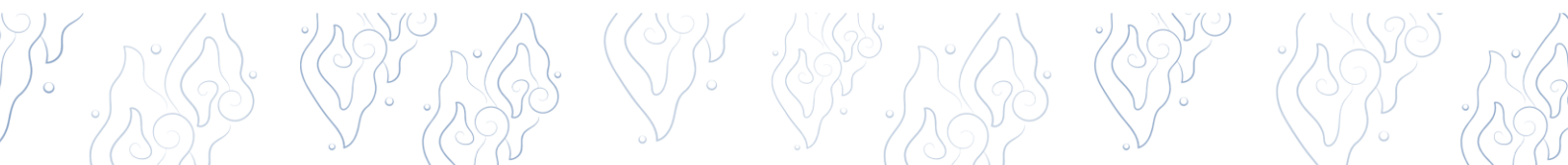
Kegiatan 4

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Pertemuan dengan Walikota Sorong |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 20 Januari 2026 Kantor Walikota Sorong |
| Latar Belakang | <p>Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka membahas sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan aset Pemerintah Kota Sorong yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Salah satu aset tersebut merupakan lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Rumah Sakit Siloam, dengan rencana pertemuan lanjutan bersama pihak RS Siloam pada tanggal 4 Februari 2026.</p> <p>Selain itu, dibahas pula kondisi pelayanan RSUD Sele Be Solu yang mengalami penurunan akibat tingginya jumlah pasien yang harus dilayani, sementara fasilitas dinilai belum memadai. Pertemuan ini juga membahas aspek tata ruang Kota Sorong terkait rencana pembangunan RS Siloam yang menurut peta tata kota lama berada di kawasan pemukiman.</p> |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Walikota Sorong terkait berbagai permasalahan yang sedang dihadapi, khususnya terkait aset, pembangunan RS Siloam, pelayanan kesehatan, dan tata ruang kota. |
| Peserta Kegiatan | Walikota Sorong, Anggota BPP Papua Barat Daya, serta Pokja Papua Sehat. |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi dan Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat |
| Poin-Poin Pembahasan | <p>Pembahasan difokuskan pada permasalahan aset Kota Sorong yang belum diserahkan oleh Kabupaten Sorong, termasuk aset yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan RS Siloam serta rencana pertemuan lanjutan dengan pihak RS Siloam pada tanggal 4 Februari 2026. Selain itu, dibahas kondisi pelayanan RSUD Sele Be Solu yang mengalami penurunan akibat tingginya jumlah pasien dan keterbatasan fasilitas, serta aspek kepemimpinan direksi yang dinilai perlu perhatian. Pertemuan juga membahas usulan perubahan tata ruang Kota Sorong terkait lokasi pembangunan RS Siloam yang</p> |

| | |
|--|--|
| | berdasarkan peta tata kota lama berada di kawasan pemukiman. |
| Hasil Kegiatan | Aset Kota Sorong yang belum diserahkan oleh Kabupaten Sorong akan segera diproses, terutama terkait aset yang direncanakan untuk pembangunan RS Siloam, dengan rencana pertemuan lanjutan bersama BPN dan Bagian Hukum Kota Sorong. Terkait rencana pembangunan RS Siloam dan pertemuan dengan pihak RS Siloam pada tanggal 4 Februari 2026, Walikota Sorong menyatakan kesediaannya untuk hadir dan mendukung penuh seluruh proses. Selain itu, akan dilakukan peninjauan terhadap pelayanan RSUD Sele Be Solu oleh Dewan Pengawas. Pemerintah Kota Sorong juga akan melakukan perubahan tata ruang terkait lokasi pembangunan RS Siloam yang saat ini berada di kawasan pemukiman berdasarkan peta tata kota lama. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | BPP akan mengawal proses penyerahan aset Kota Sorong dari Kabupaten Sorong, memfasilitasi pertemuan dengan pihak RS Siloam bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong, mengawal peninjauan oleh Dewan Pengawas RSUD Sele Be Solu, serta mengawal proses perubahan tata ruang Kota Sorong terkait rencana pembangunan RS Siloam. |
| Dokumentasi |  |

Kegiatan 5


| | |
|----------------------|--|
| Nama Kegiatan | Pertemuan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya |
|----------------------|--|



| | |
|--|--|
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Jum'at 23 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | Persiapan pemanfaatan aset tanah bekas Gedung Pertemuan Kabupaten Sorong yang direncanakan menjadi bakal Rumah Sakit Siloam. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait legalitas aset serta persiapan perjanjian kerja sama. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Anggota Pokja Sehat BPP Papua Barat Daya 3. Pak Fadlun Bauw dari Biro Hukum |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Status aset saat ini masih belum jelas terkait sertifikat tanah. 2. Isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebelumnya, termasuk kekurangan dan kelemahan dalam substansinya. 3. Rencana pertemuan dengan tim legal Siloam. |
| Hasil Kegiatan | Direncanakan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait (stakeholder) mengenai legalitas aset. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Rencana pertemuan dengan pihak Siloam. |
| Dokumentasi |  |

Kegiatan 6

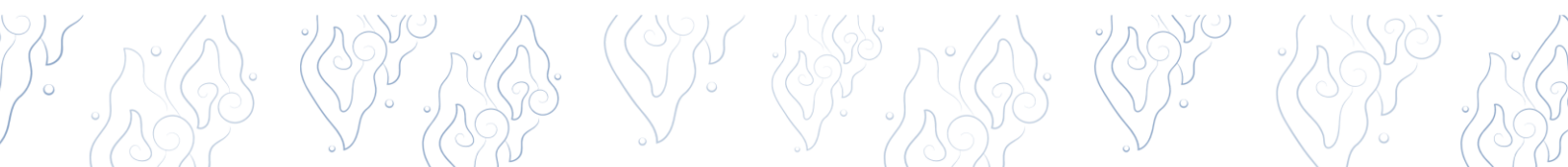
| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Rapat Tindak Lanjut Proses Penyelesaian Tanah Rumah Sakit Siloam |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Jum'at 23 Januari 2026 di Kantor Gubernur PBD |
| Latar Belakang | <p>Pengelolaan aset yang tidak tepat dapat berdampak pada potensi kerugian negara. Hasil temuan KPK mensyaratkan adanya perbaikan sistem inventarisasi serta perlindungan terhadap aset milik daerah, baik di tingkat Provinsi Papua Barat Daya maupun pada tataran kota/kabupaten. Permasalahan aset yang terbengkalai menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah untuk diselesaikan. Namun, karena adanya hambatan dalam proses penyelesaiannya, sesuai kewenangan dalam pelaksanaan SHEK, Badan Pengarah Papua melakukan langkah-langkah strategis untuk membantu Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebagai penanggung jawab pembangunan di tingkat provinsi serta Pemerintah Kota Sorong sebagai pemilik sejumlah aset yang memerlukan tindakan legalisasi kepemilikan.</p> <p>Salah satu aset yang sedang dalam proses penyelesaian adalah lahan bekas Gedung Pertemuan Kabupaten Sorong yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Pusat Bisnis Sorong, yang akan melakukan pengembangan RS Siloam beserta beberapa usaha lainnya. Namun, dalam proses pembangunannya menghadapi permasalahan dan terbengkalai sejak tahun 2013 hingga tahun 2026.</p> <p>Pembangunan rumah sakit oleh pihak swasta menjadi salah satu program yang memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menghadirkan layanan kesehatan untuk melayani masyarakat dalam rangka mencapai indikator capaian misi Sehat tanpa membebani APBD serta berpotensi meningkatkan PAD.</p> |

| | |
|--|---|
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terkait rencana investasi di bidang kesehatan melalui pembangunan rumah sakit swasta. 2. Melakukan sinkronisasi data aset Pemerintah Kota Sorong. 3. Melakukan koordinasi terkait legalitas status tanah dan keberadaan sertifikat beberapa aset Pemerintah Kota Sorong. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan daerah Provinsi (Gubernur dan jajaran) 2. Pimpinan daerah Kota Sorong 3. Management Bank Mandiri 4. Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Evaluasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai status legalitas dan keabsahan tanah. 2. Penjelasan mengenai status agunan yang disampaikan oleh pihak PT Bank Mandiri. 3. Rencana tindak lanjut terkait persiapan legalitas aset tanah bekas Gedung Pertemuan Kabupaten Sorong. 4. Rencana investasi di bidang kesehatan melalui pembangunan rumah sakit swasta. |
| Hasil Kegiatan | Akan dilaksanakan pertemuan lanjutan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Segera menindaklanjuti proses pengurusan legalitas aset. |
| Dokumentasi |  |

Kegiatan 7


| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Kunjungan Kerja dalam rangka Sinkronisasi, Evaluasi, dan Koordinasi Misi Papua Sehat di Kota Sorong |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 27 Januari 2026 di Kantor Dinas Kesehatan Kota Sorong |
| Latar Belakang | Pembangunan kesehatan dalam kerangka Otonomi Khusus mengemban tiga target capaian indikator, yaitu peningkatan usia harapan hidup, penurunan prevalensi stunting, dan eliminasi malaria. Pokja Sehat melakukan evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Kesehatan Kota Sorong sebagai upaya penilaian terhadap program yang berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pencapaian indikator tersebut. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program bidang kesehatan di Kota Sorong dalam rangka Otonomi Khusus. 2. Melaksanakan sinkronisasi program terkait pencapaian indikator Misi Sehat. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong dan jajaran 2. Anggota Pokja Sehat BPP PBD |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Evaluasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program unggulan Dinas Kesehatan Kota Sorong dalam mengatasi permasalahan sesuai indikator Misi Sehat. 2. Pengadaan obat dan logistik. 3. Penganggaran terhadap program-program bidang Misi Sehat. 4. Proyek Strategis Nasional Cek Kesehatan Gratis beserta kendalanya. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan pembiayaan/anggaran masih menjadi penyebab kurang optimalnya pelaksanaan program. 2. Program penuntasan malaria masih dibantu oleh NGO, dengan kekhawatiran apabila NGO tidak lagi terlibat maka |

| | |
|---|--|
| | <p>Dinas Kesehatan akan mengalami kesulitan dalam mengatasi kesenjangan yang mungkin muncul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Proporsi pengadaan obat program belum disiasati secara cermat oleh Dinas Kesehatan sehingga berpotensi terjadi kekurangan obat program. 4. Terdapat program unggulan yang dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kesehatan, yaitu program pengingat minum obat serta program unggulan lainnya. |
| <p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p> | <p>Perlu melaksanakan perencanaan yang komprehensif berdasarkan target capaian yang rasional dengan perhitungan yang efisien.</p> |
| <p>Dokumentasi</p> |   |



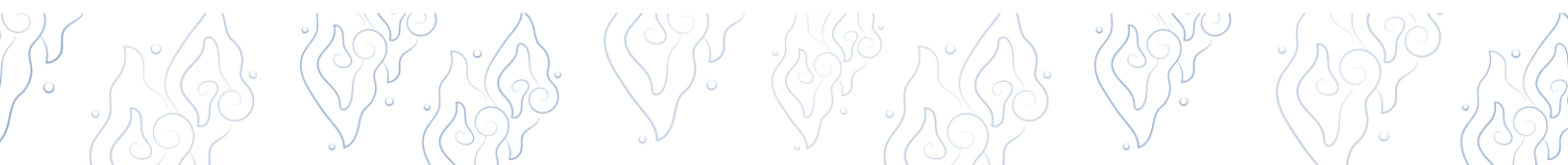
Kegiatan 8

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Kunjungan Kerja dalam rangka Meninjau Gedung PSC 119 |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 27 Januari 2026 di Gedung PSC 119 PBD |
| Latar Belakang | <p>Penanganan kasus darurat (emergency) di lapangan, baik yang terkait kesehatan, bencana alam, maupun kecelakaan lalu lintas, memerlukan sistem komunikasi dan koordinasi yang cepat, tepat, dan terintegrasi.</p> <p>Provinsi Papua Barat Daya menghadapi tantangan tingginya angka kematian akibat keterlambatan penanganan kasus darurat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terpadu berbasis digital yang mampu menghubungkan lintas sektor, antara lain Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, kepolisian, BNPB, Diskominfo, dan pemadam kebakaran.</p> <p>PSC 119 hadir sebagai sistem komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas institusi untuk memastikan penanganan darurat berjalan lebih efektif. Forum SHEK ini diselenggarakan untuk membangun kesepahaman, menyatukan komitmen, serta menyusun langkah tindak lanjut dalam mewujudkan PSC 119 yang solid dan aplikatif di Papua Barat Daya.</p> |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinkronisasi program PSC 119 dengan tim PSC 119 Kota Sorong. 2. Melakukan evaluasi terhadap pembangunan gedung serta persiapan tim PSC 119. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab PSC 119 2. Dokter dan Tim kerja PSC 119 3. Pokja Sehat BPP PBD |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Evaluasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat |

| | |
|--|---|
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsionalisasi dan pemanfaatan bangunan Gedung PSC 119 yang dibangun sejak tahun 2023. 2. Sarana kendaraan ambulans yang tersedia. 3. Tim kerja PSC 119. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan PSC 119. 2. Status kepegawaian tim kerja PSC 119 belum jelas. 3. PSC 119 belum terintegrasi secara menyeluruh. 4. Mobil ambulans yang tersedia berukuran kecil. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Akan dilaksanakan Forum SHEK terkait PSC 119. |
| Dokumentasi |  |

Kegiatan 9

| | |
|----------------------|--|
| Nama Kegiatan | SHEK bersama BPKAD PBD, Pemda Kota Sorong, Pemda PBD serta ATR/BPN, dan BPKAD Kota Sorong (Aset untuk RS Siloam) |
|----------------------|--|

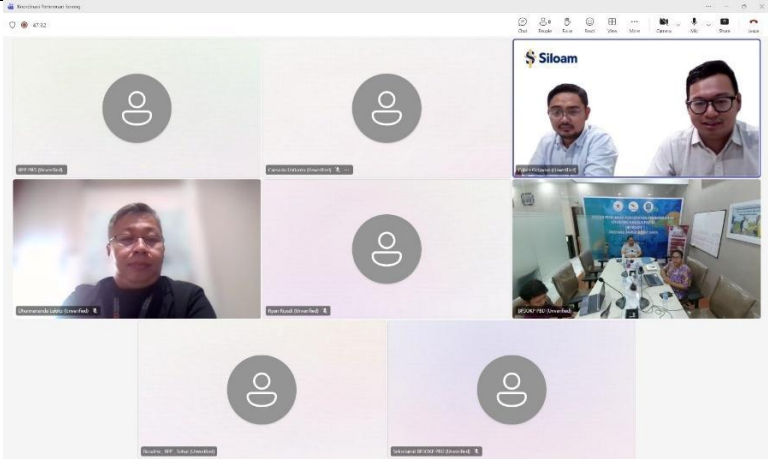


| | |
|--|--|
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Jum'at, 30 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | <p>Dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Kota Sorong berupa lahan yang sedang diusulkan untuk proses legalisasi ke Kantor ATR/BPN, diperlukan percepatan pengurusan dan pelengkapan berkas guna penyelesaian proses tersebut. Pertemuan terkait aset ini telah beberapa kali dilaksanakan, namun masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat penyelesaian administrasi serta progres kerja Dinas Pertanahan Kota Sorong.</p> <p>Oleh karena itu, SHEK bersama BPKAD Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, ATR/BPN, dan pihak terkait lainnya dilaksanakan untuk mengevaluasi perkembangan serta memperkuat koordinasi dalam percepatan legalisasi aset.</p> |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan evaluasi bersama Kantor ATR/BPN terkait progres penyelesaian legalitas aset Pemerintah Kota Sorong. 2. Menyusun rencana tindak lanjut guna mempercepat proses legalisasi aset Kota Sorong. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP PBD 2. Kepala bagian Keuangan dan Aset Provinsi PBD 3. Biro Hukum Provinsi Papua Barat Daya 4. kepala Biro Pemerintahan Prov PBD 5. Kabag Hukum Kota Sorong 6. Kabid Pendayagunaan tanah Dinas Pertanahan Kota Sorong 7. Staf ATR/BPN Kota Sorong 8. Pokja Sehat BPP PBD |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Evaluasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat |

| | |
|---|---|
| <p>Poin-Poin Pembahasan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanahan Kota Sorong diminta segera melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diminta oleh ATR/BPN Kota Sorong. 2. ATR/BPN akan melakukan pengecekan terhadap progres berkas yang telah diproses. 3. Perlu segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengurusan Hak Pengelolaan (HPL), mengingat kewenangan saat ini berada pada Menteri ATR/BPN. |
| <p>Hasil Kegiatan</p> | <p>Disepakati bahwa akan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap status dan progres penyelesaian legalitas aset Pemerintah Kota Sorong.</p> |
| <p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan proses legalisasi aset. 2. Mempercepat pelengkapan dokumen persyaratan oleh Dinas Pertanahan Kota Sorong sesuai ketentuan ATR/BPN. 3. Melakukan koordinasi lanjutan dengan ATR/BPN terkait proses pengurusan HPL sesuai kewenangan yang berlaku. |
| <p>Dokumentasi</p> |  |

Kegiatan 10

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Rapat Daring bersama Siloam Group |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Jum'at, 30 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | <p>Pelayanan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya memiliki tantangan yang beragam dalam upaya pencapaian indikator misi Papua Sehat. Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan kesehatan.</p> <p>Rencana pembangunan Rumah Sakit Siloam di Kota Sorong telah dimulai sejak tahun 2013, pada saat wilayah tersebut masih berada dalam administrasi Kabupaten Sorong. Dalam perjalanannya, pembangunan mengalami hambatan sehingga belum dapat dilanjutkan. Saat ini, Pemerintah Kota Sorong melakukan upaya perizinan kembali bersama pihak Siloam Group guna melanjutkan pembangunan yang sempat terhenti.</p> <p>Diharapkan dengan keterlibatan sektor swasta, pembangunan fasilitas kesehatan dapat mendukung peningkatan layanan kesehatan serta membantu meringankan beban pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD, baik di Kota Sorong maupun Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka itu, direncanakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, dan Siloam Group yang difasilitasi oleh BP3OKP Papua Barat Daya.</p> |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Melakukan koordinasi dan sinkronisasi jadwal, konten kegiatan, serta penyusunan rundown acara pertemuan antara pemerintah daerah dan Siloam Group. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Pokja Sehat BPP PBD 3. Tim manajemen dan tim legal Siloam grup |

| | |
|---|--|
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rundown kegiatan pertemuan. 2. Penetapan materi yang akan dibahas dalam pertemuan. 3. Penentuan dan finalisasi waktu pelaksanaan kegiatan. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rundown kegiatan pertemuan telah tersusun. 2. Disepakati penjadwalan pertemuan pada tanggal 4 Februari 2026. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Melaksanakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, dan manajemen RS Siloam sesuai jadwal yang telah disepakati. |
| Dokumentasi |  |

3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas

Kegiatan 1

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Shine School Anniversary 7th 2026 |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | <p>Senin, 19 Januari 2026</p> <p>Shine School Sorong</p> |
| Latar Belakang | Shine School merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang dinilai mampu menjaga kualitas dan mutu pendidikan. Keberadaan sekolah ini menjadi bagian dari kontribusi sektor pendidikan swasta dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. |

| | |
|--|--|
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Menghadiri perayaan dan ibadah syukur Hari Ulang Tahun ke-7 Shine School Sorong sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap pengembangan pendidikan di Papua Barat Daya. |
| Peserta Kegiatan | Kegiatan dihadiri oleh Anggota BPP PBP Papua Barat Daya, Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Sehat, tamu undangan termasuk para inisiator sekolah, Drs. Lambert Jitmau, Bupati Sorong, Gubernur Papua Barat Daya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Sorong. |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Cerdas |
| Poin-Poin Pembahasan | Kegiatan diawali dengan pelaksanaan Misa sebagai ungkapan syukur atas perjalanan 7 tahun Shine School, kemudian dilanjutkan dengan resepsi perayaan. Dalam rangkaian acara tersebut disampaikan sambutan oleh Gubernur Papua Barat Daya. Kegiatan juga diisi dengan penampilan atraksi seni dan sains dari siswa tingkat SD hingga SMA sebagai bagian dari apresiasi terhadap capaian dan kreativitas peserta didik. |
| Hasil Kegiatan | Kegiatan berlangsung dengan lancar dan tertib, serta diakhiri dengan makan bersama dalam suasana kebersamaan. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Terus menjalin komunikasi dan dukungan terhadap lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di Papua Barat Daya. |
| Dokumentasi |  |

Kegiatan 2

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Lepas Sambut dan Kongres I Alumni Kota Studi "Hollandia" Jayapura Di Provinsi Papua Barat Daya |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Senin, 26 Januari 2026 di Gd Lambert Jitmau Kota Sorong |
| Latar Belakang | Kegiatan Lepas Sambut dan Kongres I Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dan mendata kembali para alumni dalam suatu wadah perkumpulan kemasyarakatan yang diharapkan dapat berkontribusi bagi pembangunan di Tanah Papua. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Terlibat sebagai alumni/peserta kegiatan sekaligus mendampingi pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. |
| Peserta Kegiatan | Anggota BPP PBD, Pokja Cerdas BPP PBD, alumni kota studi "Hollandia" Jayapura, Pemda PBD, dll |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi dan Harmonisasi |
| Misi/Keterangan | Papua Cerdas |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Parade peserta alumni dari kabupaten/kota dan provinsi. 2. Ibadah syukur. 3. Memories of Hollandia. 4. Pelaksanaan kongres. |
| Hasil Kegiatan | Hasil kongres menetapkan terpilihnya Ketua Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia. Drs. Elisa Kambu merupakan calon tunggal yang diusulkan oleh kabupaten/kota dan terpilih secara aklamasi. Masing-masing kabupaten/kota mengusulkan perwakilan sebagai Badan Formatur. Kegiatan diakhiri dengan bersenandung bersama grup Black Brothers. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun struktur kepengurusan melalui Badan Formatur yang telah dibentuk. 2. Melakukan pendataan dan konsolidasi alumni pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. |

3. Menyusun program kerja Ikatan Alumni sebagai wadah kontribusi terhadap pembangunan di Tanah Papua.

Dokumentasi



3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif

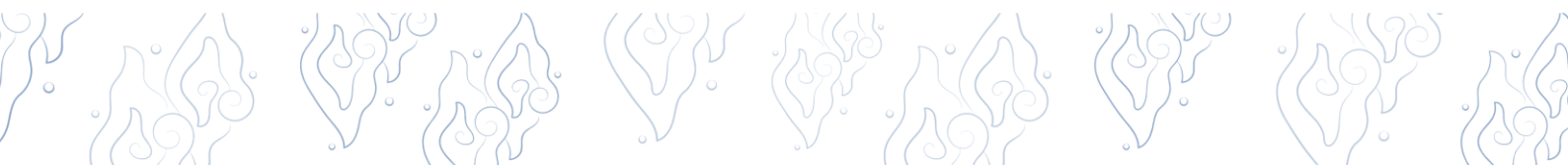
Kegiatan 1

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Pertemuan dengan Pihak PT ANJ |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Senin, 5 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ) merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) dengan fokus usaha pada komoditas kelapa sawit dan sagu. Keberadaan perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor produktif di daerah, termasuk dalam kontribusi terhadap pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Membangun koordinasi dan komunikasi antara BP3OKP Papua Barat Daya dengan ANJ Group. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP PBD 2. Pokja Cerdas BPP PBD 3. Humas PT ANJ |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian mengenai operasional perusahaan yang selama ini berjalan dengan baik. 2. Pembahasan mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana CSR dari ANJ. 3. Dorongan untuk pembangunan kembali AKNESS, di mana dukungan dari ANJ dinilai dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. |
| Hasil Kegiatan | Pihak ANJ menyatakan kesediaan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BP3OKP Papua Barat Daya sebagai badan pengarah, serta terbuka untuk berkolaborasi melalui dukungan CSR maupun kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Produktif menindaklanjuti koordinasi pemanfaatan dana CSR bersama PYCH di Sorong Selatan untuk pengembangan Ekowisata Sagu di Kais. |

| | |
|-------------|---|
| | 2. Pokja Cerdas menindaklanjuti penyusunan MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya terkait pendirian AKNESS. |
| Dokumentasi |  |

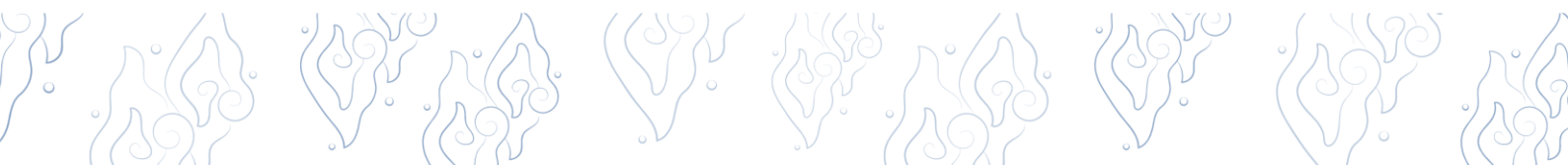
Kegiatan 2

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Pertemuan/Audiensi dengan Tokoh Adat Suku Malamoi |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 6 Januari 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya |
| Latar Belakang | Bank Papua memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di Tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya. Dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas |

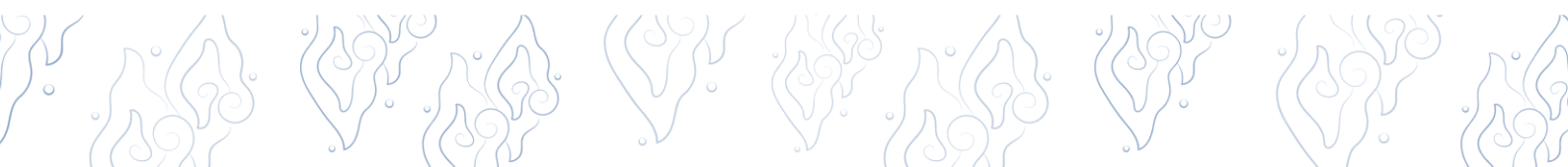



| | |
|--|---|
| | <p>layanan, diperlukan penguatan tata kelola, sumber daya manusia (SDM), serta modernisasi sistem perbankan. Gagasan untuk menjadikan Bank Papua sebagai Bank Devisa merupakan salah satu langkah strategis guna memperluas layanan transaksi valuta asing serta mendukung kegiatan ekspor dan impor.</p> <p>Selain itu, diperlukan figur komisaris yang memiliki pengalaman serta visi yang kuat di bidang perbankan guna memperkuat arah kebijakan dan pengawasan strategis Bank Papua. Pertemuan ini dilaksanakan untuk mendengarkan visi dan strategi Bapak Yohanis Gifelem terkait pengembangan Bank Papua, serta membahas dukungan terhadap pencalonannya sebagai Komisaris Bank Papua.</p> |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <p>Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung pandangan, visi, dan misi Bapak Yohanis Gifelem terkait pengembangan Bank Papua menuju Bank Devisa yang sehat dan kokoh. Selain itu, pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas dukungan terhadap pencalonan Bapak Yohanis Gifelem sebagai Komisaris Bank Papua, serta merumuskan langkah-langkah strategis dan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh BPP dan BP3OKP dalam mendukung penguatan peran Bank Papua, khususnya dalam pengelolaan dana daerah dan pengembangan ekonomi Papua Barat Daya.</p> |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP PBD 2. Pokja Produktif BPP PBD |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | <p>A. Arahan Pimpinan BPP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPP Produktif akan menyusun surat/konsep yang ditujukan kepada Direktur Bank Papua dan Gubernur Papua Barat Daya terkait usulan Bapak Yohanis Gifelem sebagai calon Komisaris Bank Papua menggantikan Bapak Alfons Sesa. 2. Disampaikan bahwa saat ini terdapat sejumlah Komisaris Bank Papua yang tidak berlatar belakang perbankan dan sebagian besar berasal dari unsur pemerintahan. |

| | |
|--|--|
| | <p>B. Penyampaian Bapak Yohanis Gifelem</p> <p>1. Gagasan Mendorong Bank Papua Menjadi Bank Devisa</p> <p>Latar Belakang Pengalaman:</p> <p>10 (sepuluh) tahun sebagai bankir di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).</p> <p>Auditor keuangan gereja di Klasis Malamoi.</p> <p>Visi:</p> <p>Mewujudkan Bank Papua menjadi Bank Devisa yang sehat dan kokoh, dengan menekankan bahwa kesehatan bank ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat dalam berpikir dan bertindak.</p> <p>C. Misi dan Strategi</p> <p>Misi 1: Peningkatan Kualitas SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bank Papua. • Mengubah pola pikir dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap institusi. • Mendorong budaya kerja disiplin dan profesional. • Melakukan perbaikan layanan secara menyeluruh, mulai dari petugas keamanan hingga pimpinan. • Menghindari praktik kredit fiktif, korupsi, dan human error. • Menegaskan pentingnya integritas (clear and clean). • Disampaikan bahwa kondisi saat ini dinilai masih seperti “bendahara”, belum optimal dalam mengembangkan dana secara produktif. <p>Misi 2: Penguatan Sarana dan Prasarana (Hardware dan Software)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan dan peningkatan teknologi perbankan yang modern. • Penyediaan layanan virtual account Bank Papua sebagai bagian dari kesiapan menuju Bank Devisa. • Penguatan sistem berbasis satelit dan teknologi mutakhir. |
|--|--|



| | |
|------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bank Devisa diharapkan mampu mengelola transaksi ekspor-impor. • Dicontohkan pengalaman ekspor kulit buaya dari Sorong ke Hawaii dan Honolulu yang menghasilkan devisa. <p>Misi 3: Peningkatan Pengelolaan Dana Masyarakat (Damas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pengelolaan dana masyarakat, termasuk Dana Abadi (Otsus). • Penghimpunan dana pihak ketiga. • Dana masyarakat menjadi sumber utama operasional dan penguatan likuiditas bank. <p>Misi 4: Ekspansi Valuta Asing dan Perkreditan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekspansi valuta asing dan kredit dilakukan setelah tiga misi sebelumnya dimantapkan. • Mendorong transaksi penukaran valuta asing dilakukan di Bank Papua. • Strategi mengarahkan pengelola cottage/hotel di Raja Ampat agar turis asing menukar uang di Bank Papua. • Pengaturan fasilitas money changer di bandara. • Untuk pengajuan kredit skala besar, nasabah diarahkan memindahkan dananya ke Bank Papua sebagai jaminan kredit. |
| <p>Hasil Kegiatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Disepakati pentingnya transformasi Bank Papua menuju Bank Devisa melalui penguatan SDM, modernisasi sistem, serta optimalisasi pengelolaan dana masyarakat. 2. Menguatnya dukungan terhadap pencalonan Bapak Yohanis Gifelem sebagai Komisaris Bank Papua, dengan mempertimbangkan pengalaman dan visi yang dimiliki di bidang perbankan. 3. Disepakati perlunya penyusunan rekomendasi resmi oleh BPP dan BP3OKP sebagai dasar bagi Gubernur untuk menyampaikan surat kepada Komisaris Bank Papua. 4. Visi, misi, dan business plan akan dirapikan serta dijadikan dokumen pendukung dalam proses rekomendasi. |



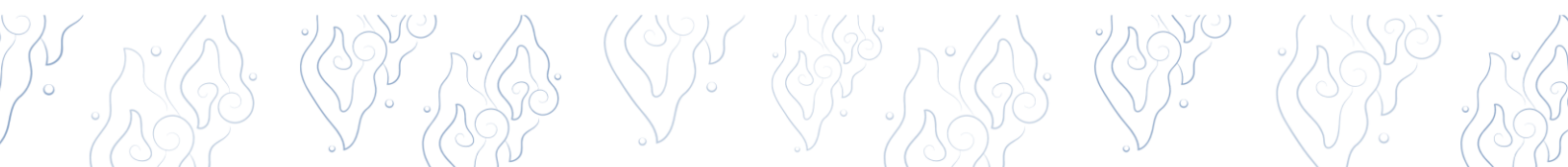
| | |
|--|--|
| | 5. Didorong percepatan regulasi terkait Dana Abadi (Perdasus) sebagai bagian dari penguatan penghimpunan dan pengelolaan dana daerah melalui Bank Papua. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Yohanis Gifelem segera merapikan dan menjilid dokumen hasil pembahasan, serta melampirkan visi, misi, dan business plan sebagai dokumen pendukung. 2. BPP menyusun rekomendasi resmi kepada Bank Papua melalui Gubernur Papua Barat Daya. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Gubernur menyurati Komisaris Bank Papua. 3. Mendorong penyusunan Perdasus tentang Dana Abadi. |
| Dokumentasi |  |

Kegiatan 3

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Rapat Pembahasan Tarif Kapal |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Kamis, 15 Januari 2026 Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya |
| Latar Belakang | <p>Rute penyeberangan Sorong–Waisai (Raja Ampat) merupakan jalur transportasi utama yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta sektor pariwisata di Kabupaten Raja Ampat. PT. Belibis Express sebagai operator kapal mengajukan rencana kenaikan tarif tiket dengan alasan meningkatnya biaya operasional, seperti harga BBM, suku cadang, dan Upah Minimum Regional (UMR).</p> <p>Rencana kenaikan tarif tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari Pemerintah Daerah, DPRD Papua Barat Daya,</p> |

| | |
|--|--|
| | MRP, dan pemangku kepentingan lainnya, mengingat kondisi daya beli masyarakat Raja Ampat yang relatif rendah serta pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan aksesibilitas transportasi publik. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas usulan kenaikan tarif tiket kapal PT. Belibis Express trayek Sorong–Raja Ampat. 2. Menghimpun masukan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, MRP, dan instansi terkait. 3. Mencari solusi yang adil dan proporsional antara keberlanjutan usaha operator dan kemampuan masyarakat. |
| Peserta Kegiatan | Gubernur Papua Barat Daya, Pj. Sekda Provinsi Papua Barat Daya, OPD Provinsi Papua Barat Daya (Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pariwisata, Asisten II), Anggota DPRD Papua Barat Daya, Anggota MRP Papua Barat Daya, BPP Pokja Produktif, Perwakilan PT. Belibis Express, dan Perwakilan Pemerintah Daerah Raja Ampat. |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Paparan PT. Belibis Express <ul style="list-style-type: none"> • Tarif tiket saat ini sebesar Rp125.000 (termasuk asuransi jiwa). • Operasional rute Sorong–Waisai terbantu melalui subsidi silang dari kabupaten lain. • Kenaikan biaya operasional (BBM, suku cadang, dan UMR) menjadi alasan utama usulan kenaikan tarif. • Ditemukan penumpang tanpa tiket akibat lemahnya pengawasan saat proses boarding. 2. Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya <ul style="list-style-type: none"> • Kapal memperoleh subsidi BBM dari Pemerintah Provinsi. • Pada periode hari besar (Natal dan Tahun Baru serta Lebaran), pelayanan ditambah menjadi dua kali sehari dengan dukungan subsidi. • Akan dilakukan pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Daerah Raja Ampat. |


| | |
|--|--|
| | <p>3. DPRD Papua Barat Daya</p> <ul style="list-style-type: none">• Diperlukan regulasi (Pergub) yang mengatur tarif.• Usulan kenaikan hingga 60% dinilai memberatkan masyarakat.• Kenaikan tarif disarankan tidak terlalu tinggi dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. <p>4. MRP (Pokja Adat dan Anggota)</p> <ul style="list-style-type: none">• Daya beli masyarakat dinilai rendah.• Frekuensi pelayaran hanya satu kali sehari dan barang bercampur dengan penumpang.• Usulan kenaikan maksimal 10% apabila sangat diperlukan.• Diperlukan perbaikan fasilitas kapal.• Diminta transparansi terkait subsidi dan keuntungan dari angkutan barang. <p>5. Pemerintah Daerah Raja Ampat</p> <ul style="list-style-type: none">• Kewenangan kenaikan tarif berada pada Pemerintah Provinsi.• Diperlukan dasar hukum melalui Pergub.• Kebijakan subsidi daerah terkendala efisiensi anggaran. <p>6. Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya</p> <ul style="list-style-type: none">• Prinsip kemampuan dan kemauan membayar diatur dalam Permenhub.• Apabila tarif dinaikkan, harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan.• Disarankan adanya diferensiasi tarif bagi wisatawan lokal dan mancanegara. <p>7. BPP</p> <ul style="list-style-type: none">• Diperlukan kajian ulang terhadap struktur tarif.• Diusulkan uji coba tarif serta skema subsidi silang atau diferensiasi tarif. |
|--|--|



| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Dibentuk tim kecil untuk melakukan kajian dan mengajukan subsidi ke Kementerian Perhubungan, dengan masukan BP3OKP apabila diperlukan ke tingkat pusat. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan tarif ditangguhkan sementara hingga dilakukan kajian menyeluruh. 2. Apabila kenaikan dilakukan, besaran yang disarankan maksimal 10% dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. 3. Diperlukan transparansi terkait subsidi yang diterima operator serta pendapatan dari angkutan barang. 4. Diperlukan peningkatan pelayanan dan fasilitas kapal sebagai bagian dari pertimbangan kebijakan tarif. 5. Akan dilakukan rapat lanjutan bersama DPRK Raja Ampat dan pihak terkait. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim kecil untuk melakukan kajian komprehensif terkait struktur biaya operasional, subsidi, dan kemampuan bayar masyarakat. 2. Melaksanakan rapat lanjutan bersama DPRK Raja Ampat dan pemangku kepentingan terkait. 3. Menyusun draft Pergub sebagai dasar hukum pengaturan tarif. 4. Mengkaji skema subsidi (BBM atau tiket) serta diferensiasi tarif bagi wisatawan domestik dan mancanegara. 5. Meningkatkan pengawasan boarding guna mengurangi penumpang tanpa tiket. 6. Mendorong peningkatan pelayanan dan fasilitas kapal sebagai bagian dari kebijakan tarif. |
| Dokumentasi |  |

Kegiatan 4

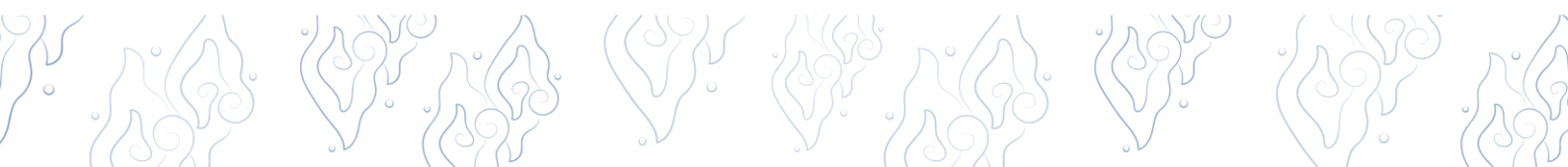
| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Pertemuan/Audiensi dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Papua Barat |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 20 Januari 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya |
| Latar Belakang | Pertemuan dilaksanakan dalam rangka Silaturahmi dan Hearing Koordinasi (SHEK) bersama Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Papua Barat beserta staf. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya dengan lembaga vertikal Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang memiliki kewenangan di wilayah Papua Barat Daya. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Melakukan koordinasi dengan lembaga vertikal Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di wilayah Papua Barat Daya terkait program, aset, dan pembangunan prasarana kawasan. |
| Peserta Kegiatan | Pertemuan dihadiri oleh Anggota BPP PBD; Pimpinan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua Barat, C. Sagrim, ST, MT; PPK Perencanaan BPBPK Papua Barat; serta Pokja Produktif BPP PBD. |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | Pembahasan difokuskan pada koordinasi program-program usulan BPBPK Papua Barat di wilayah Papua Barat Daya, evaluasi terhadap aset BPBPK Papua Barat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah di wilayah Papua Barat Daya, serta koordinasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Papua Barat. |
| Hasil Kegiatan | Ditemukan bahwa usulan kegiatan/program untuk Tahun 2027 yang masuk hanya berasal dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Maybrat dengan 7 usulan kegiatan dan Kabupaten Tambrauw dengan 2 usulan kegiatan, dari total 6 wilayah bawahan di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, ditemukan bahwa sejumlah aset yang telah diserahkan oleh BPBPK Papua Barat kepada Pemerintah Daerah di wilayah Papua Barat Daya tidak |

| | |
|--|---|
| | dirawat atau dijaga dengan baik. Ditemukan pula adanya hambatan pelaksanaan SPAM di wilayah Papua Barat yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan SPAM Regional. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Perlu dilakukan pertemuan teknis awal antara Pokja Papua Produktif BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya dan PPK Perencanaan BPBPK Papua Barat untuk membahas secara rinci permasalahan usulan program BPBPK Papua Barat di wilayah Papua Barat Daya. Selain itu, perlu dilakukan SHEK terkait pengelolaan aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh BPBPK Papua Barat di wilayah Papua Barat Daya. Diperlukan pula SHEK lanjutan mengenai kelembagaan SPAM Regional dengan melibatkan para pihak di wilayah Papua Barat Daya, termasuk Gubernur, Bupati/Walikota, serta UPT Kementerian Pekerjaan Umum. |
| Dokumentasi |  |

Kegiatan 5

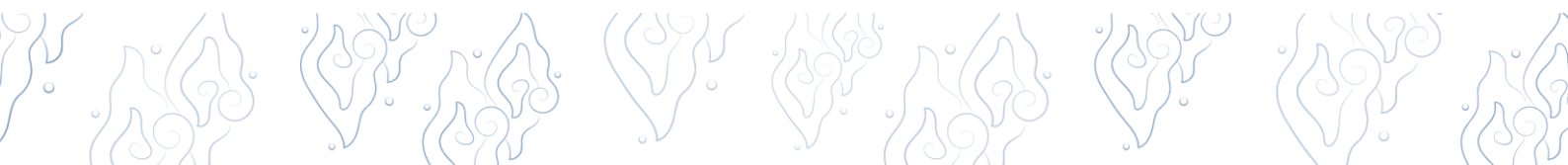
| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Diseminasi Final Studi Kelayakan Strategi Pengembangan Transportasi Laut Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Rabu, 21 Januari 2026 Vega Hotel Sorong |

| | |
|---|---|
| <p>Latar Belakang</p> | <p>Pembangunan infrastruktur transportasi laut merupakan faktor kunci dalam percepatan pembangunan wilayah Papua Barat Daya, khususnya dalam memperkuat konektivitas kawasan selatan yang masih menghadapi keterisolasian geografis dan keterbatasan infrastruktur logistik. Kabupaten Sorong Selatan memiliki garis pantai yang panjang, namun fasilitas pelabuhan masih terbatas, sementara Kabupaten Maybrat tidak memiliki akses laut langsung dan sangat bergantung pada jalur distribusi melalui Sorong Selatan.</p> <p>Kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya logistik, rendahnya frekuensi layanan transportasi laut, keterbatasan akses pasar, serta lambatnya pertumbuhan ekonomi wilayah. Komoditas pertanian, perikanan, dan hasil hutan belum terintegrasi secara efisien dalam sistem distribusi regional, sehingga menimbulkan disparitas harga dan rendahnya nilai tambah produk lokal.</p> <p>Melalui kegiatan diseminasi ini, hasil studi kelayakan strategi pengembangan transportasi laut disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan pelabuhan bersama Sorong Selatan–Maybrat yang terintegrasi dengan jaringan logistik nasional.</p> |
| <p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p> | <p>Menyampaikan hasil studi kelayakan pembangunan pelabuhan bersama Sorong Selatan–Maybrat.</p> <p>Mengidentifikasi kondisi eksisting, tantangan, dan potensi pengembangan transportasi laut regional.</p> <p>Membangun pemahaman bersama antar pemangku kepentingan mengenai strategi pengembangan infrastruktur maritim.</p> <p>Menyusun arah kebijakan percepatan pembangunan pelabuhan sebagai simpul logistik kawasan.</p> <p>Menghimpun masukan untuk perencanaan tindak lanjut pembangunan.</p> |



| | |
|---|--|
| Peserta Kegiatan | Tim Pusat Kajian Ekonomi Orang Asli Papua, Asisten Bidang Pembangunan, Kepala Dinas terkait, Kepala Distrik Moswaren, tokoh masyarakat dan kepala kampung di wilayah Moswaren, serta Pokja Produktif BPP PBD |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi dan Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | <p>Kondisi Eksisting dan Tantangan</p> <p>Infrastruktur pelabuhan di Sorong Selatan masih terbatas dari sisi kedalaman dan fasilitas bongkar muat. Jalur darat penghubung dari wilayah pedalaman Maybrat menuju pesisir belum optimal, sehingga distribusi barang terhambat. Ketergantungan pada moda transportasi skala kecil menyebabkan biaya logistik tinggi dan ketidakpastian layanan.</p> <p>Analisis Potensi Ekonomi</p> <p>Studi menunjukkan potensi besar pada sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Pembangunan pelabuhan diproyeksikan meningkatkan arus barang ekspor regional, mempercepat distribusi komoditas unggulan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir.</p> <p>Konsep Pelabuhan Bersama</p> <p>Pelabuhan dirancang sebagai simpul logistik regional yang melayani Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat secara terintegrasi dengan pelabuhan nasional. Konsep ini bertujuan menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi transportasi, dan memperkuat jaringan perdagangan regional.</p> <p>Tahapan Pengembangan</p> <p>Jangka pendek: pembangunan dermaga dan akses dasar.</p> <p>Jangka menengah: modernisasi fasilitas logistik.</p> <p>Jangka panjang: pengembangan pelabuhan regional dan kawasan industri.</p> <p>Dampak Lingkungan dan Sosial</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Dilakukan identifikasi risiko lingkungan pesisir dan potensi konflik sosial sejak tahap awal. Mitigasi diarahkan pada konsep pelabuhan hijau (green port), rehabilitasi ekosistem pesisir, serta pendekatan partisipatif dengan masyarakat adat.</p> |
| <p>Hasil Kegiatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pelabuhan bersama Sorong Selatan–Maybrat dinilai layak secara teknis dan ekonomi. 2. Pelabuhan diproyeksikan menjadi penggerak transformasi ekonomi kawasan berbasis komoditas lokal. 3. Integrasi transportasi darat dan laut menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan logistik regional. 4. Peningkatan efisiensi distribusi diperkirakan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing daerah. 5. Dukungan kebijakan lintas pemerintah dan keterlibatan masyarakat adat menjadi faktor strategis keberlanjutan proyek. |
| <p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan rencana pembangunan pelabuhan bersama dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD). 2. Mempercepat pembangunan jalan penghubung Maybrat–pesisir Sorong Selatan sebagai infrastruktur pendukung utama. 3. Melakukan sosialisasi dan konsultasi publik untuk memperoleh dukungan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat. 4. Menyusun skema pembiayaan campuran (APBN/APBD/KPBU) guna menarik investasi swasta. 5. Membentuk tim koordinasi lintas kabupaten dan provinsi untuk percepatan implementasi proyek. 6. Menyiapkan kajian teknis lanjutan (DED, AMDAL, dan rencana operasional pelabuhan). |



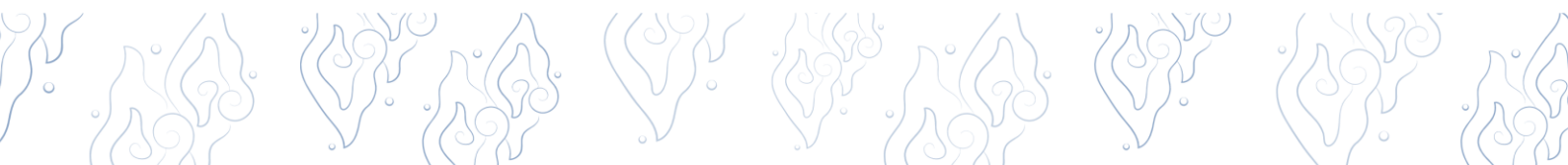


Kegiatan 6

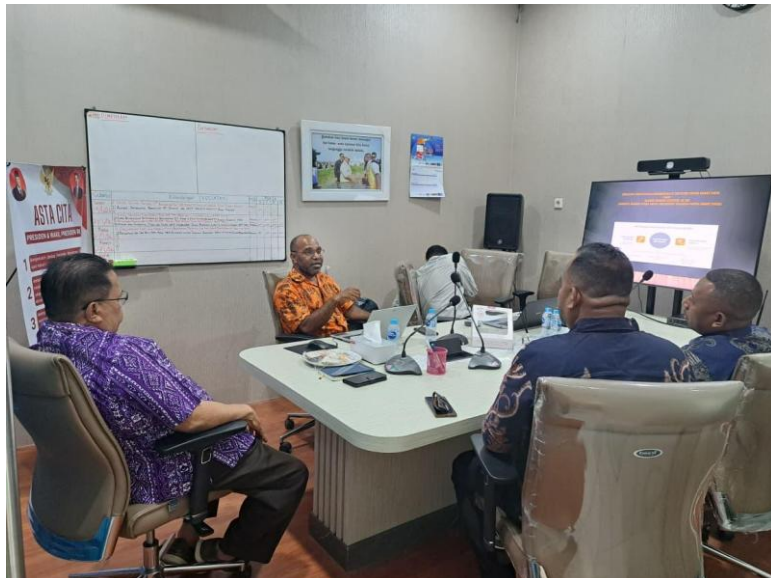
| | |
|---|---|
| <p>Nama Kegiatan</p> | <p>Pertemuan dengan Tim Pusat Kajian Pengembangan Ekonomi Orang Asli Papua (Mitra UNIPA)</p> |
| <p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p> | <p>Rabu, 21 Januari 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya</p> |
| <p>Latar Belakang</p> | <p>Percepatan pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan pemerintah, kajian ilmiah, dan strategi pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP). Dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP/BP3OKP) memiliki mandat strategis dalam sinkronisasi, harmonisasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.</p> <p>Pusat Kajian Pengembangan Ekonomi Orang Asli Papua berperan sebagai lembaga kajian yang menghasilkan analisis, rekomendasi kebijakan, serta model pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal OAP. Peran akademik dan riset yang dijalankan pusat kajian memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan BPP dalam penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti (evidence-based policy).</p> <p>Sinergi kedua institusi menjadi penting untuk memastikan percepatan pembangunan memiliki fondasi ilmiah yang kuat, berorientasi pada keberlanjutan ekonomi OAP, serta responsif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Papua.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan koordinasi dan sinergi antara pusat kajian dan BPP dalam pengembangan kebijakan pembangunan Papua. 2. Menyelaraskan agenda riset ekonomi OAP dengan kebutuhan perencanaan pembangunan. 3. Mengintegrasikan hasil kajian akademik ke dalam kebijakan percepatan pembangunan. 4. Mendorong model pembangunan berbasis data, riset, dan potensi lokal OAP. 5. Menyusun kerangka kerja kolaboratif jangka menengah dan panjang. |
| <p>Peserta Kegiatan</p> | <p>Tim peneliti dari Pusat Kajian Pengembangan Ekonomi Orang Asli Papua (Mitra UNIPA).</p> |
| <p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p> | <p>Koordinasi</p> |
| <p>Misi/Keterangan</p> | <p>Papua Produktif</p> |
| <p>Poin-Poin Pembahasan</p> | <p>Peran Pusat Kajian Pusat kajian berfungsi sebagai think tank yang menyediakan analisis ekonomi, pemetaan potensi wilayah, model pemberdayaan OAP, serta rekomendasi kebijakan berbasis riset.</p> <p>Peran BPP/BP3OKP BPP menjalankan fungsi koordinatif dan pengarah kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus melalui forum sinkronisasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.</p> <p>Titik Sinergi Sinergi diwujudkan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pertukaran data dan hasil kajian; • dukungan riset untuk penyusunan kebijakan; • evaluasi program berbasis indikator ekonomi OAP; • pengembangan pilot project ekonomi lokal; • penguatan kapasitas perencanaan daerah. |

| | |
|--|--|
| | <p>Pendekatan Pembangunan OAP</p> <p>Disepakati bahwa pembangunan ekonomi OAP harus berbasis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potensi lokal dan sumber daya tradisional; • ekonomi produktif berbasis komunitas; • perlindungan hak adat; • peningkatan nilai tambah komoditas lokal; • keterlibatan generasi muda Papua. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapai kesepakatan bahwa pusat kajian dan BPP memiliki peran komplementer dan saling memperkuat. 2. Disepakati pentingnya kebijakan berbasis riset dalam percepatan pembangunan Papua. 3. Teridentifikasi kebutuhan sistem data ekonomi OAP yang terintegrasi. 4. Penguatan kolaborasi lintas lembaga dinilai sebagai kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 5. Riset ekonomi OAP diarahkan menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan publik. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk forum kerja bersama antara pusat kajian dan BPP untuk koordinasi rutin. 2. Menyusun agenda riset prioritas yang mendukung program percepatan pembangunan. 3. Mengembangkan sistem data ekonomi OAP yang terintegrasi lintas sektor. 4. Mendorong pilot project ekonomi berbasis komunitas OAP. 5. Mengintegrasikan hasil kajian ke dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah. 6. Melakukan diseminasi hasil riset kepada pemerintah daerah dan masyarakat. |

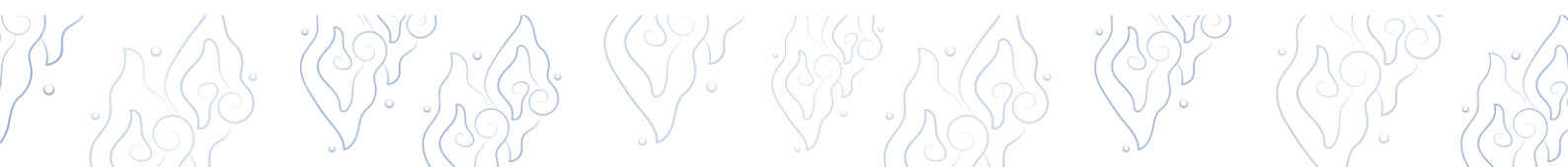


Dokumentasi



Kegiatan 7

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Audiensi dengan PT Bank Mandiri Cabang Sorong |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 27 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan salah satu bank milik negara yang berkembang di Indonesia, termasuk di Kota Sorong. |

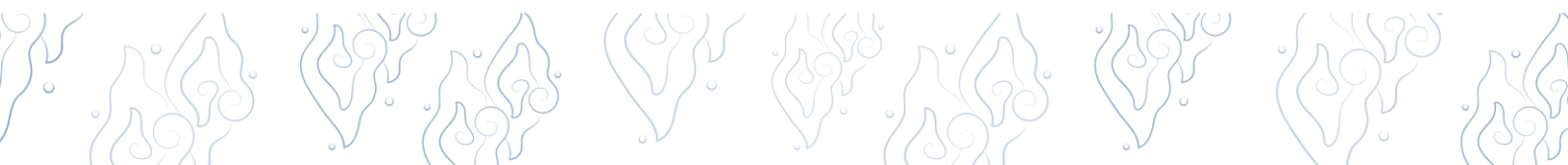


| | |
|--|--|
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Mendengarkan promosi produk dan fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. |
| Peserta Kegiatan | Anggota BPP PBD, Pokja Cerdas BPP PBD, Bank Mandiri. Ka Cabang Mandiri Maranatha/Rufei |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | <p>Pihak Bank Mandiri menjelaskan beberapa fasilitas yang tersedia, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit Pegawai. 2. Livin' by Mandiri. 3. Deposito. 4. Kredit UMKM. 5. Layanan VIP yang bekerja sama dengan Garuda Indonesia. 6. Layanan kartu kredit. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penawaran fasilitas VIP Card kepada pimpinan. 2. Koordinasi terkait Dana Usaha/Kredit untuk UMKM dalam rangka program Koperasi Merah Putih. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelaahan internal terhadap penawaran produk dan fasilitas yang disampaikan oleh Bank Mandiri. 2. Menindaklanjuti komunikasi dengan pihak Bank Mandiri terkait penawaran VIP Card. 3. Menginformasikan kepada pihak terkait apabila terdapat kebutuhan pemanfaatan produk atau layanan yang ditawarkan. 4. Akan ada pertemuan lanjutan terkait dukungan Bank Mandiri terhadap program Koperasi Merah Putih. |



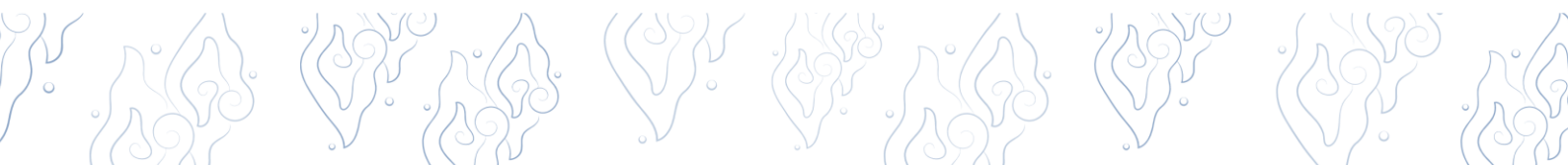
Kegiatan 8

| | |
|---|---|
| <p>Nama Kegiatan</p> | <p>Audiensi dengan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya</p> |
| <p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p> | <p>Selasa, 27 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD</p> |
| <p>Latar Belakang</p> | <p>Dilakukan koordinasi awal terkait kegiatan-kegiatan pertanian di wilayah Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2026.</p> |
| <p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p> | <p>Mendapatkan data kegiatan serta persoalan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (P2KP), khususnya pada bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, guna mendukung ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.</p> |
| <p>Peserta Kegiatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya, Drs. Otto Ihalaw, MA 2. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) Dinas P2KP, Abner Basna, S.P., M.Si. dan staf 3. Pokja Papua Produktif BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya |
| <p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p> | <p>Sinkronisasi, Koordinasi</p> |



| | |
|--|--|
| Misi/Keterangan | Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | <p>Pertanian didorong sebagai salah satu instrumen pemberantasan kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya melalui pemanfaatan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah sasaran penerima MBG di Provinsi Papua Barat Daya sekitar ±206.000 orang, dengan proyeksi perputaran uang dari program MBG mencapai ±Rp681.720.000.000 per tahun.</p> <p>Anggaran MBG bersumber dari Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan strategi bersama agar peredaran uang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).</p> <p>Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) memiliki alokasi anggaran sebesar Rp65 miliar pada tahun 2025 dan Rp65 miliar pada tahun 2026. Anggaran tersebut digunakan di Kabupaten Sorong Selatan seluas 20.000 hektar dan di Kabupaten Sorong seluas 12.000 hektar.</p> |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat regulasi yang mengatur pembelian pangan lokal oleh SPPG dalam program MBG. 2. Terdapat kendala pada peruntukan lahan karena berbenturan dengan areal HPH dan rumah tinggal. 3. Belum tersedia penggilingan padi modern di areal Cetak Sawah Rakyat (CSR) untuk mengolah hasil pertanian. 4. Sistem drainase di wilayah SP1 dan SP2 yang menjadi lokus kegiatan CSR di Sorong Selatan mengalami kerusakan. 5. Kekurangan tenaga penyuluh pertanian di daerah. 6. Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Daya. |

| | |
|--------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Mendorong penerbitan edaran Satgas MBG terkait belanja bahan pangan lokal.3. Mendorong pelaksanaan launching penanaman padi serentak pada akhir Februari 2026 yang direncanakan dihadiri Menteri Pertanian.4. Mendorong penguatan Koperasi Merah Putih berbasis kawasan (misalnya Moswaren Raya) untuk pengadaan penggilingan padi modern.5. Mendorong peluncuran program Petani Milenial OAP “Sa Bisa” yang digagas oleh Dinas P2KP Provinsi Papua Barat Daya guna meningkatkan keterlibatan Orang Asli Papua dalam program Cetak Sawah Rakyat.6. Menyusun sistem rantai pasok terintegrasi untuk mendukung dapur MBG.7. Mendorong Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Papua Barat untuk melakukan desain ulang irigasi di wilayah Moswaren dan areal transmigrasi di Kabupaten Sorong.8. Perlu adanya penambahan tenaga penyuluh pertanian. |
| Dokumentasi |  |





Kegiatan 9

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Workshop Diseminasi Pemanfaatan DTSEN melalui Aplikasi SEPAKAT Provinsi Papua Barat Daya |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Jum'at, 30 Januari 2026 di Hotel Royal Mamberamo Kota Sorong |
| Latar Belakang | <p>Pemanfaatan data terpadu merupakan prasyarat penting dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, khususnya dalam upaya penanganan kemiskinan, perlindungan sosial, dan penguatan kebijakan berbasis bukti. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berperan sebagai sumber data strategis yang dapat mendukung perencanaan lintas sektor, terutama dalam integrasi program sosial dan ekonomi masyarakat.</p> <p>Dalam konteks Provinsi Papua Barat Daya, optimalisasi pemanfaatan DTSEN melalui aplikasi SEPAKAT menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah, sinkronisasi program pembangunan, serta efektivitas intervensi kebijakan. Aplikasi SEPAKAT memungkinkan analisis data secara sistematis, pemetaan wilayah prioritas, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.</p> |

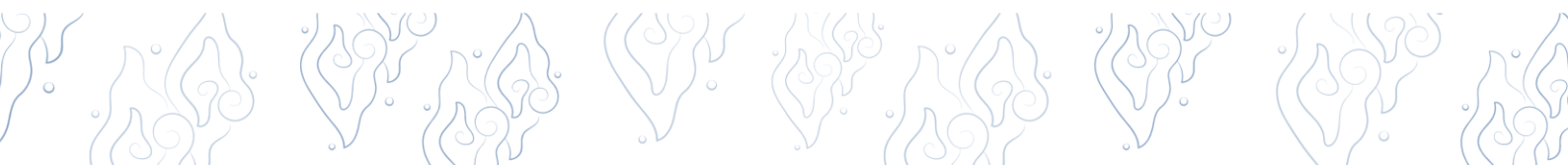
| | |
|---|--|
| | <p>Kegiatan diseminasi ini diinisiasi oleh Tim SKALA Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan DTSEN, sekaligus mendorong integrasi sistem data dalam proses perencanaan pembangunan daerah.</p> |
| <p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan DTSEN sebagai dasar perencanaan pembangunan. 2. Memperkenalkan penggunaan aplikasi SEPAKAT sebagai alat analisis data pembangunan daerah. 3. Mendorong integrasi data sosial ekonomi dalam penyusunan program pembangunan daerah. 4. Memperkuat kapasitas teknis aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan dan analisis data. 5. Menyelaraskan pemanfaatan data antar perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas program pembangunan. |
| <p>Peserta Kegiatan</p> | <p>Tim Skala, Bappeda Provinsi/Kabupaten (Ketua Tim Perencanaan), BPS Provinsi/Kabupaten (Wali Data Statistik), Dinas Kominfo (Pengelola Sistem & Infrastruktur Data), Inspektorat Daerah (Pengawasan tata kelola data) dan OPD terkait lainnya seperti Dinas Sosial,</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung/Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan</p> |
| <p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p> | <p>Koordinasi</p> |
| <p>Misi/Keterangan</p> | <p>Papua Produktif</p> |
| <p>Poin-Poin Pembahasan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran DTSEN dalam Perencanaan Daerah DTSEN dipahami sebagai basis data strategis dalam mendukung penentuan sasaran program sosial, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. |

| | |
|--|---|
| | <p>2. Pemanfaatan Aplikasi SEPAKAT Aplikasi SEPAKAT diperkenalkan sebagai alat analisis untuk memetakan kondisi sosial ekonomi wilayah, mengidentifikasi kelompok masyarakat rentan, serta mendukung penyusunan intervensi program berbasis data.</p> <p>3. Integrasi Data Lintas Sektor Ditekankan pentingnya integrasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sinergis, efektif, dan menghindari tumpang tindih program.</p> <p>4. Penguatan Kapasitas Aparatur Kegiatan menekankan perlunya peningkatan kapasitas teknis aparatur dalam pengolahan, analisis, dan interpretasi data guna mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti.</p> |
| Hasil Kegiatan | <p>1. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran strategis DTSEN dalam perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>2. Aplikasi SEPAKAT dinilai efektif sebagai alat analisis data untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.</p> <p>3. Terbangun kesadaran bersama mengenai pentingnya penggunaan data terpadu dalam penyusunan program pembangunan.</p> <p>4. Teridentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas teknis aparatur dalam pengelolaan dan pemanfaatan data.</p> <p>5. Integrasi data lintas sektor dipandang sebagai kebutuhan mendesak dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.</p> |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <p>1. Melaksanakan pelatihan lanjutan terkait penggunaan aplikasi SEPAKAT bagi perangkat daerah.</p> <p>2. Mendorong penetapan DTSEN sebagai referensi utama dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan sosial ekonomi daerah.</p> |

| | |
|--------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengembangkan sistem integrasi data lintas perangkat daerah guna mendukung perencanaan pembangunan yang terkoordinasi. 4. Membentuk tim pengelola data daerah berbasis lintas sektor untuk memastikan validitas dan pemanfaatan data secara optimal. 5. Melaksanakan pendampingan teknis secara berkelanjutan oleh Tim SKALA dalam pemanfaatan DTSEN dan aplikasi SEPAKAT. 6. Mengintegrasikan pemanfaatan DTSEN dalam dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. |
| Dokumentasi | - |

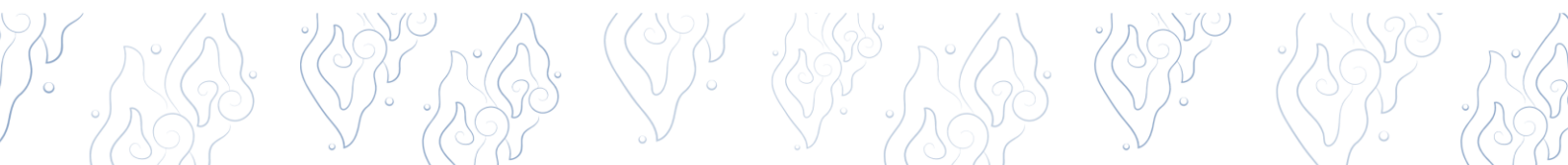
Kegiatan 10

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Pertemuan dengan Cipta Karya |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Jum'at, 30 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | Pertemuan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan SHEK bersama PPK Perencanaan BPBPK Papua Barat guna melakukan peninjauan terhadap kegiatan BPBPK Papua Barat di wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Melakukan SHEK terhadap kegiatan BPBPK Papua Barat di wilayah Papua Barat Daya guna memastikan kesesuaian perencanaan, kesiapan dokumen, serta dukungan kelembagaan dan administratif daerah. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. PPK Perencanaan BPBPK Papua Barat 2. Anggota Pokja Papua Produktif BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya |



| | |
|---|--|
| | 3. Anggota Pokja Papua Damai BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | <p>A. Sinkronisasi</p> <p>Temuan Sinkronisasi Perencanaan Pusat–Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan pemerintah daerah harus selaras dengan siklus perencanaan Kementerian PUPR agar dapat diakomodasi. Diperlukan tim kerja bersama (Pemda–BP3OKP–Balai) untuk menghindari bypass usulan. 2. Perlu sinkronisasi sistem perencanaan dalam masa transisi dari SIPPA ke KPJMN. Operator daerah memiliki peran penting karena KPJMN wajib diinput oleh admin daerah. 3. Di Papua Barat Daya, baru Kabupaten Tambrauw dan Maybrat yang aktif melakukan input, sehingga terjadi ketidaksinkronan antar kabupaten/kota. Batas input KPJMN adalah 9 Januari 2026 dan akan dibuka kembali pada pertengahan tahun. 4. Konsultasi Regional (Konreg) yang dilaksanakan setiap Oktober menjadi momentum penting dalam sinkronisasi program 3–5 tahun ke depan. <p>Isu Kunci Sinkronisasi:</p> <p>Banyak usulan daerah tidak sinkron secara waktu dan dokumen sehingga tidak terserap dalam anggaran pusat. Tidak seluruh OPD memahami perubahan sistem dari SIPPA ke KPJMN.</p> <p>B. Harmonisasi</p> <p>Temuan Harmonisasi Kewenangan:</p> |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dokumen perencanaan (KAK, DED, AMDAL) serta kesiapan lahan (reservoir, SPAM, offtake). ● Kementerian/Balai bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik kegiatan. <p>Pembagian kewenangan telah jelas, namun belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah daerah.</p> <p>C. Evaluasi</p> <p>Hasil Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tahapan penyusunan DED SPAM Regional oleh BPBPK Papua Barat untuk SPAM Regional di Papua Barat Daya dengan anggaran Rp250 miliar yang belum dapat diproses lebih lanjut karena belum terbentuknya kelembagaan SPAM Regional. 2. Faktor utama tidak masuknya berbagai usulan infrastruktur daerah ke dalam KRISNA Bappenas dan tidak dapat diambil oleh Kementerian PU melalui KRISNA adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembebasan lahan belum tuntas; ○ Dokumen perencanaan tidak lengkap; ○ Keterlambatan input sistem. 3. Kapasitas daerah masih terbatas dalam: <ul style="list-style-type: none"> ○ SDM operator SIPPA/KPJMN; ○ Pemahaman terhadap siklus perencanaan Kementerian PU. 4. Pembinaan tahunan telah dilaksanakan, namun belum sistematis dan merata. 5. Konferensi Regional efektif sebagai alat seleksi program berbasis kelengkapan dokumen, namun banyak pemerintah daerah belum siap secara administratif saat pelaksanaan Konreg. <p>Kesimpulan Evaluasi:</p> <p>Hambatan utama bukan terletak pada ketersediaan</p> |
|--|---|



| | |
|--|--|
| | <p>anggaran, melainkan pada ketidaksiapan administratif, teknis, dan kelembagaan di tingkat daerah.</p> <p>D. Koordinasi</p> <p>Pola Koordinasi yang Didorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Kerja <ul style="list-style-type: none"> ○ Anggota: Pemda (Bappeda dan OPD teknis), BP3OKP, dan Balai Cipta Karya. ○ Fungsi: Kurasi usulan, pendampingan dokumen, serta pengawalan sistem perencanaan. 2. Koordinasi Operator Sistem <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengumpulkan operator SIPPA dan KPJMN se-Papua Barat Daya. ○ Tujuan: Mengecek progres input, sinkronisasi teknis dengan Cipta Karya, serta memastikan kesiapan lahan SPAM/reservoir yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. <p>Isu Kunci Koordinasi:</p> <p>Koordinasi masih bersifat reaktif dan belum terlembaga secara tetap. Belum terdapat forum rutin lintas OPD–Balai–BP3OKP.</p> |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi sistem dan waktu perencanaan antara pusat dan daerah belum seragam. 2. Harmonisasi dokumen perencanaan, RTRW, dan pembagian kewenangan belum sepenuhnya selaras. 3. Evaluasi menunjukkan anggaran yang tersedia belum terserap optimal akibat kesiapan daerah yang belum memadai. 4. Diperlukan pembentukan tim kerja dan forum koordinasi tetap lintas aktor (Kementerian, Balai, Pemerintah Daerah) yang dikoordinasikan oleh BP3OKP. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Kerja Koordinasi Pengisian Dokumen Usulan kepada Kementerian PUPR (BPBPK Papua |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>Barat Daya) yang melibatkan Balai Kementerian PU, Pemerintah Daerah, dan BP3OKP.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Melaksanakan klinik dokumen perencanaan sebelum Konferensi Regional Kementerian PU yang diselenggarakan setiap bulan Oktober.3. Mendukung percepatan pembebasan lahan strategis (SPAM dan reservoir) serta pembentukan kelembagaan SPAM Regional.4. Menghubungkan dan mendorong kepala daerah di wilayah Papua Barat Daya agar memperhatikan proses penginputan KPJMN untuk seluruh kabupaten/kota. |
| <p>Dokumentasi</p> |  <p>The top photograph shows three men seated around a conference table in a meeting room. A whiteboard with text and diagrams is visible on the wall behind them. The bottom photograph provides a closer view of the participants, showing laptops, water bottles, and microphones on the table. A large screen in the background displays a presentation slide with the text 'PENGEMBANGAN PERENCANAAN RENCANA JANGKA MENENGAH (KPJMN) KABUPATEN PAPUA BARAT DAYA'.</p> |

Kegiatan 11

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Diseminasi Laporan antara hasil Survey Alur Rencana Dermaga/Pelabuhan Nawir Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Jum'at, 30 Januari 2026 di Hotel Rylich Panorama Sorong |
| Latar Belakang | <p>Pelabuhan lama di wilayah Sorong Selatan saat ini telah mengalami kepadatan aktivitas (traffic penuh), sehingga diperlukan alternatif lokasi pelabuhan baru untuk mendukung kelancaran distribusi barang serta pengembangan wilayah. Pelabuhan Nawir di Distrik Wayer direncanakan sebagai solusi untuk meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, serta memperkuat peran Sorong Selatan sebagai daerah penyangga pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya.</p> <p>Rencana pembangunan Pelabuhan Nawir telah tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan didukung melalui pendanaan Otsus DTI Tahun 2025, sehingga diperlukan diseminasi hasil survei dan rencana alur pembangunan kepada para pemangku kepentingan.</p> |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan rencana pembangunan Pelabuhan Nawir kepada para pemangku kepentingan. 2. Mendapatkan masukan dan dukungan dari pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat. 3. Membahas aspek teknis, kewenangan, serta kesiapan lahan dan dokumen pendukung pembangunan. |
| Peserta Kegiatan | Kepala Dinas Perhubungan Bersama Staf, Tim Studi Kelayakan Pelabuhan Nawir, Bappeda dan Dinas Perhubungan Sorong Selatan, Kepala Dinas Perhubungan Maybrat, Wakil Rektor Unimuda, Kepala Dinas PUPR PBD, Pokja Produktif BPP PBD (virginus turot), Perwakilan |


| | |
|---|---|
| | Pelabuhan Teminabuan, Wakil Ketua I MRP PBD dan Anggota MRP PBD dari Sorong Selatan |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Pelabuhan Nawir menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 2. Lokasi pelabuhan telah masuk dalam sistem RIPN dan RTRW Kabupaten Sorong Selatan. 3. Diperlukan pembangunan akses jalan menuju lokasi pelabuhan. 4. Terdapat usulan pelabuhan bersama antara Sorong Selatan dan Tambrauw. 5. Perlu dilakukan studi kelayakan lanjutan, termasuk kajian kedalaman alur dan potensi pendangkalan. 6. Pentingnya pelibatan masyarakat adat, khususnya Marga Saman sebagai pemilik hak ulayat. 7. Perlu kejelasan pembagian kewenangan pengelolaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. 8. Dukungan terhadap peningkatan Pelabuhan Wersimar sebelum pembangunan Pelabuhan Nawir. 9. Status kawasan (hutan/lahan pertanian) dinyatakan clean and clear sesuai RTRW. 10. Dampak ekonomi dari pembangunan Pelabuhan Nawir diperkirakan dapat menurunkan harga barang hingga 30% di Sorong Selatan dan Maybrat, serta mendukung program tol laut dan distribusi komoditas daerah. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara umum peserta menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Nawir. 2. Disepakati perlunya studi kelayakan lanjutan dan survei ulang, termasuk di wilayah Komor (dekat Nawir). 3. Nama "Nawir" diminta untuk tetap dipertahankan. |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Kampung Nawir menyatakan dukungan dan kesiapan menyerahkan lahan, dengan pembahasan lanjutan terkait luas dan administrasi. 5. Diperlukan koordinasi lanjutan antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terkait pembagian kewenangan. 6. Dokumen pendukung, termasuk untuk pelabuhan lain seperti Konda/Nakna, perlu segera dilengkapi. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan studi kelayakan lanjutan dan survei teknis yang mencakup kedalaman alur, kondisi kawasan, serta aspek lingkungan. 2. Mengadakan pertemuan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, dan Kementerian Perhubungan terkait pembagian kewenangan dan tahapan pembangunan. 3. Melaksanakan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat adat serta melibatkan MRP dalam proses perencanaan. 4. Menyelesaikan status lahan agar dinyatakan clean and clear sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Menyusun dan melengkapi dokumen teknis serta administrasi sebagai persyaratan pelaksanaan pembangunan. |
| Dokumentasi | - |

3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai)

Kegiatan 1

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Ibadah Perayaan Natal 2025 & Lepas Sambut Tahun Baru 2026 Keluarga Besar Suku Imekko Provinsi Papua Barat Daya |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 6 Januari 2026 Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong |
| Latar Belakang | Imekko merupakan salah satu ikatan kekeluargaan yang berasal dari wilayah Distrik Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda, dan Kokoda Utara. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya, kegiatan |

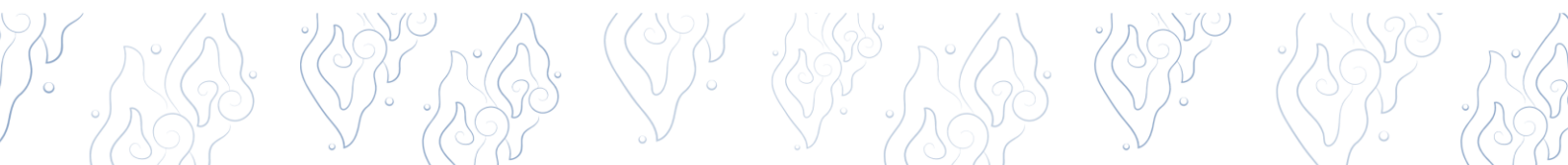
| | |
|--|---|
| | keagamaan dan kekeluargaan menjadi momentum penting dalam mempererat tali persaudaraan serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di antara anggota masyarakat Imekko. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Mendampingi Pimpinan dalam kegiatan tersebut sekaligus berpartisipasi sebagai bagian dari keluarga besar Imekko. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP PBD 2. Pemda PBD 3. Masyarakat Imekko di Provinsi Papua Barat Daya, dll |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Partisipasi dalam Ibadah Syukur. |
| Misi/Keterangan | Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan ibadah syukur. 2. Sambutan oleh Kepala Suku Imekko Provinsi Papua Barat Daya. 3. Sambutan oleh Bapak George Dedaida (Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Fraksi Otsus). 4. Kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama. |
| Hasil Kegiatan | Kegiatan ibadah dan rangkaian acara berjalan dengan lancar dan aman. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Terus menjaga dan mempererat hubungan kekeluargaan serta komunikasi yang harmonis antar anggota masyarakat Imekko di Provinsi Papua Barat Daya. |
| Dokumentasi |  |



Kegiatan 2

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Perayaan Natal Provinsi Papua Barat Daya |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Rabu, 7 Januari 2026 Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong |
| Latar Belakang | Perayaan Natal Provinsi Papua Barat Daya merupakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sebagai bentuk ungkapan syukur serta perayaan kebersamaan umat Kristiani di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, membangun harmoni sosial, serta memperkuat nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Menghadiri undangan Perayaan Natal Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan serta kebersamaan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. |
| Peserta Kegiatan | Unsur Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Harmonisasi |
| Misi/Keterangan | Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | 1. Pelaksanaan ibadah dan rangkaian Perayaan Natal Provinsi Papua Barat Daya. |

| | |
|--|--|
| | <p>2. Penyampaian sambutan dari unsur pemerintah dan tokoh agama.</p> <p>3. Kebersamaan dan silaturahmi antar unsur pemerintah dan masyarakat.</p> |
| Hasil Kegiatan | Kegiatan Perayaan Natal Provinsi Papua Barat Daya berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh kebersamaan. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Terus mendukung kegiatan keagamaan dan kebersamaan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni sosial dan kedamaian di Provinsi Papua Barat Daya. |
| Dokumentasi |  |



Kegiatan 3

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Natal dan Lepas Sambut Tahun Baru IKALJATIM di Tanah Papua |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Jum'at, 9 Januari 2026 Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong |
| Latar Belakang | Kegiatan Natal dan Lepas Sambut Tahun Baru IKALJATIM di Tanah Papua merupakan agenda kebersamaan yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Jawa Timur (IKALJATIM) sebagai wadah silaturahmi dan penguatan hubungan kekeluargaan antaranggota di wilayah Tanah Papua. Momentum perayaan ini menjadi sarana mempererat persaudaraan serta membangun kebersamaan lintas unsur masyarakat. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Menghadiri undangan kegiatan Natal dan Lepas Sambut Tahun Baru IKALJATIM di Tanah Papua sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap kegiatan kebersamaan masyarakat. |
| Peserta Kegiatan | 1. Anggota BPP PBD dan Pokja BPP PBD 2. Pengurus dan anggota IKALJATIM di Tanah Papua, serta undangan dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah daerah |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Harmonisasi |
| Misi/Keterangan | Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | 1. Pelaksanaan ibadah dan rangkaian perayaan Natal. 2. Sambutan dari pengurus IKALJATIM dan tamu undangan. 3. Kegiatan lepas sambut Tahun Baru serta ramah tamah. |
| Hasil Kegiatan | Kegiatan berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh suasana kebersamaan. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Terus menjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kebersamaan di Papua Barat Daya. |
| Dokumentasi | - |

Kegiatan 4

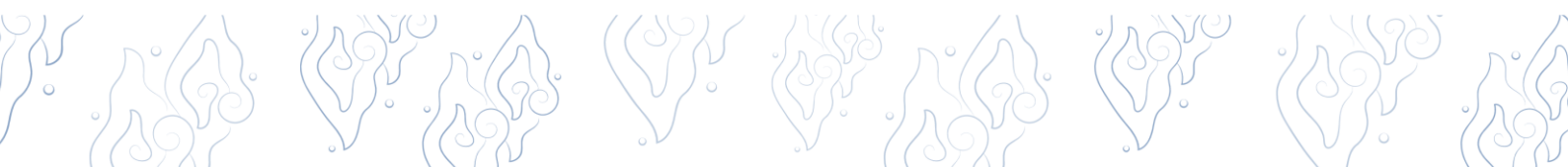
| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | HUT Perkabaran Injil |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 27 Januari 2026 di Gereja Eklesia Km 12 Sorong |
| Latar Belakang | Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pekabaran Injil merupakan momentum refleksi dan ungkapan syukur atas masuk dan berkembangnya Injil di Tanah Papua. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan nilai-nilai iman, persatuan jemaat, serta kontribusi gereja dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti peringatan HUT Pekabaran Injil sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah pelayanan Injil di Tanah Papua. 2. Mempererat kebersamaan antarjemaat dan masyarakat dalam suasana perayaan iman. 3. Memperkuat nilai spiritual sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. |
| Peserta Kegiatan | Jemaat Gereja Eklesia Km 12 Sorong, tokoh gereja, tokoh masyarakat, serta Anggota BPP PBD |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Harmonisasi |
| Misi/Keterangan | Penguatan nilai spiritual dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibadah syukur peringatan HUT Pekabaran Injil. 2. Penyampaian refleksi sejarah masuknya Injil di Tanah Papua. 3. Pesan-pesan rohani terkait peran gereja dalam pembangunan moral dan sosial masyarakat. |
| Hasil Kegiatan | Kegiatan peringatan HUT Pekabaran Injil berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan, serta memperkuat nilai spiritual dan persatuan jemaat. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai bagian dari penguatan nilai moral dan sosial masyarakat. |

| | |
|-------------|---|
| | 2. Mendorong partisipasi aktif dalam momentum keagamaan yang berkontribusi terhadap keharmonisan dan persatuan masyarakat. |
| Dokumentasi |   |

3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi)

Kegiatan 1


| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Pertemuan/Diskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Senin, 5 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya dengan Institut Ilmu Kesehatan (IIK) Bhakta Wiyata, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |



| | |
|--|---|
| | Provinsi Papua Barat Daya, dalam rangka membahas peluang kerja sama dan pemanfaatan beasiswa di bidang pendidikan kesehatan. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinkronisasi kebijakan di bidang pendidikan. 2. Melakukan koordinasi terkait pemanfaatan peluang beasiswa bagi anak-anak Papua di bidang kesehatan. 3. Melakukan koordinasi terkait penjelasan mengenai informasi beasiswa dan kerja sama dengan Institut Ilmu Kesehatan (IIK) Bhakta Wiyata. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP PBD 2. Pokja Cerdas BPP PBD 3. Pokja Sehat BPP PBD 4. Pokja Produktif BPP PBD 4. Kepala Dinas Pendidikan PBD |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat, Papua Cerdas |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang pembiayaan pendidikan yang bersumber dari non-APBD. 2. Peluang bagi anak-anak Papua untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Dalam rangka pencapaian indikator Papua Cerdas, khususnya peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik tawaran yang disampaikan oleh IIK dan akan melakukan tindak lanjut. 2. Diketahui bahwa Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum tersedia karena belum terdapat calon mahasiswa dan hasil seleksi dari Papua Barat Daya. Untuk Tahun 2026, kuota bagi Papua Barat Daya ditambahkan menjadi 20 (dua puluh) orang. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera dilakukan identifikasi calon peserta didik, khususnya Orang Asli Papua (OAP), yang berminat |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>melanjutkan pendidikan pada jenjang dan program studi yang ditawarkan oleh universitas terkait.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Tindak lanjut koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya.3. Tindak lanjut koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kondisi kampus dan program yang ditawarkan. |
| <p>Dokumentasi</p> |  |

Kegiatan 2

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Pertemuan dengan Perwakilan Polda Provinsi Papua Barat Daya |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Rabu, 21 Januari 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya |
| Latar Belakang | Adanya program Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), termasuk rekrutmen tenaga dokter untuk mendukung kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Melakukan sosialisasi proses rekrutmen tenaga dokter dalam Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS). |
| Peserta Kegiatan | Perwakilan Polda Provinsi Papua Barat Daya dan Pokja Sehat BPP PBD |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Cerdas dan Papua Sehat |
| Poin-Poin Pembahasan | Pembahasan difokuskan pada pengenalan dan penjelasan proses rekrutmen tenaga dokter dalam program SIPSS. |
| Hasil Kegiatan | Diperlukan perpanjangan masa proses rekrutmen agar proses pendaftaran dapat berjalan lebih maksimal. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai jalur media, serta membangun sinergitas dalam setiap proses rekrutmen SIPSS antara Kepolisian dan BP3OKP. |
| Dokumentasi |  |

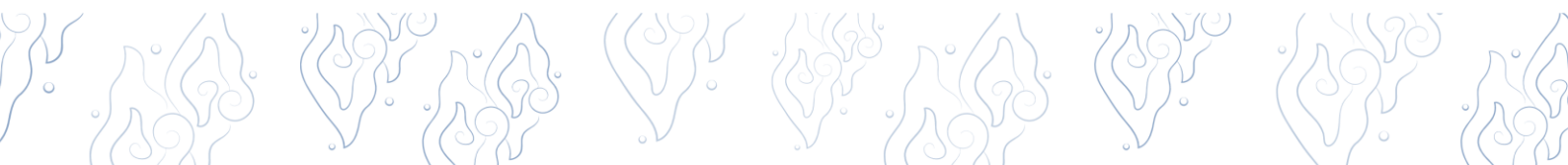


Kegiatan 3

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Pertemuan dengan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Rabu, 14 Januari 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya |
| Latar Belakang | <p>Dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara unsur legislatif, eksekutif, serta Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP).</p> <p>Kondisi fiskal APBD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 yang relatif terbatas berdampak pada keterbatasan pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya jalan, jembatan, listrik, dan fasilitas pelayanan publik. Sementara itu, kebutuhan pembangunan di kabupaten/kota, terutama wilayah pedalaman seperti Maybrat dan Tambrau, memerlukan dukungan pendanaan dari APBN melalui skema Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Otonomi Khusus (Otsus), dan Inpres Jalan Daerah (IJD).</p> <p>Rapat ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah strategis</p> |

| | |
|--|--|
| | percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor pendukung lainnya di Papua Barat Daya. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <p>Memperkuat koordinasi antara BP3OKP, DPRP, dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan Papua Barat Daya.</p> <p>Mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur daerah.</p> <p>Mendorong optimalisasi dukungan pendanaan dari APBN (DTI, Otsus, dan IJD).</p> <p>Menyusun langkah konkret dan rencana tindak lanjut kolaboratif lintas lembaga.</p> |
| Peserta Kegiatan | <p>Drs. Otto Ihalauw, MA (Pimpinan BP3OKP Papua Barat Daya)</p> <p>Herman Tubur (Koordinator Pokja Produktif)</p> <p>Virginus Turot (Anggota Pokja Produktif)</p> <p>Wilem Assem, SE (Anggota DPRP, Wakil Ketua Komisi III)</p> |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | <p>1. Arah dan Pandangan BP3OKP/BPP</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPP berperan dalam mengarahkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, sementara legislatif dan eksekutif sebagai pelaksana di lapangan. • BPP melakukan pengawasan penggunaan anggaran serta akan menyerahkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) dan executive summary kepada Bapak Wilem Assem. • Akan disusun program kerja untuk pertemuan dengan Kepala Balai Jalan Nasional di Manokwari (direncanakan awal Februari 2026). |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan harus memenuhi prinsip clean and clear serta memperhatikan aspek lingkungan sesuai RIPP 2022–2041. • Diperlukan dukungan naskah akademik dan kajian geologi untuk memperkuat argumentasi usulan pembangunan strategis. <p>2. Isu Infrastruktur Jalan dan Jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPRP bersama Panitia Anggaran mendorong percepatan pembangunan Papua Barat Daya. • Identifikasi jembatan rusak untuk diusulkan pembangunan jembatan gantung oleh TNI AD (atas arahan KASAD). • Usulan perubahan status jalan dari jalan daerah menjadi jalan nasional (IJD), antara lain: Ruas Mare–Feef Ruas Susumuk–Bintuni Ruas Kumurkek Barat–Fategomi • Kepala Balai Jalan Nasional mengharapkan usulan resmi dari pemerintah daerah. <p>3. Kondisi Anggaran dan Dukungan APBN</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 dinilai terbatas. • Alokasi fisik PU Tahun 2026 relatif kecil (contoh: Moswaren dan Feef–Miyah). • Diperlukan dukungan DTI, Otsus, dan IJD melalui APBN. <p>4. Isu Kelistrikan dan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan PLN terkait pembangunan jalur listrik Susumuk–Fan Kahrio. • Program pemasangan 600 meter listrik gratis bagi OAP pada tahun berjalan. • Terkait 12 sumur minyak dan gas di perbatasan Maybrat–Bintuni, telah terdapat kesepakatan adat pembagian hasil (DBH), namun diperlukan pembahasan lanjutan yang melibatkan dua gubernur dan dua bupati. |
|--|---|



| | |
|--|--|
| | <p>5. Pembangunan Fasilitas Publik dan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan Gereja Katolik Santo Andreas Ayata (proposal dapat diajukan ke Kementerian Agama dengan dukungan BPP). • Pembukaan kembali Bandara Ayata (Pemprov telah menganggarkan pembersihan area). • Pembahasan ketahanan pangan bersama DPRP Komisi IV. • Pembahasan dana desa bersama KPPN Sorong (Kanwil Keuangan Papua Barat). <p>6. Agenda Koordinasi Lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Februari 2026: Pertemuan BPP dan Gubernur dengan pihak RS Siloam. • Rencana pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya terkait Pulau Mansinam dan usulan jalan Susumuk–Bintuni. • Rencana pertemuan bersama Kepala Balai Jalan Nasional di Manokwari. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Disepakati penguatan kemitraan antara BP3OKP dan DPRP Papua Barat Daya dalam percepatan pembangunan. 2. Tersusunnya daftar prioritas ruas jalan dan jembatan yang akan diperjuangkan melalui skema nasional (IJD/APBN). 3. Adanya komitmen untuk mendorong dukungan DTI, Otsus, dan IJD guna mengatasi keterbatasan APBD. 4. Kesepahaman untuk membahas DBH sumur migas lintas kabupaten/provinsi secara formal. 5. Kesepakatan mendorong pembangunan fasilitas sosial (gereja, bandara, listrik) melalui sinergi pusat dan daerah. 6. Perlunya penyusunan naskah akademik dan kajian teknis sebagai dasar penguatan usulan kepada pemerintah pusat. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan naskah RAPP serta executive summary kepada Bapak Wilem Assem. 2. Mengagendakan pertemuan awal Februari 2026 dengan Kepala Balai Jalan Nasional di Manokwari. 3. Mendorong rekonsiliasi antara Bupati Maybrat dan Bapak Zakeus Momao. |

4. Mengagendakan pembahasan DBH migas lintas wilayah pada pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya.
5. Berkoordinasi dengan DPRD Komisi IV terkait ketahanan pangan.
6. Melakukan pembahasan dana desa bersama KPPN Sorong.
7. Mendampingi pengajuan proposal pembangunan Gereja Katolik Santo Andreas Ayata ke Kementerian Agama.
8. Menyusun kajian akademik dan geologi sebagai dasar penguatan usulan pembangunan strategis.

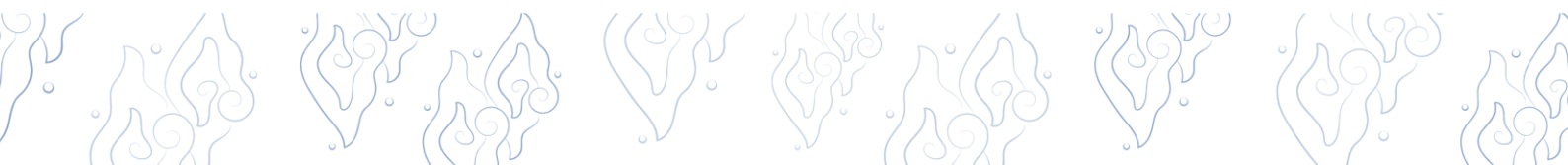
Dokumentasi



Kegiatan 4

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Perayaan Natal Nasional Partai Gerindra sekaligus Pertemuan dengan Bapak Hashim S. Djojohadikusumo (Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi) |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Sabtu, 17 Januari 2026 Aimas Convention Center dan Aston Hotel Sorong |
| Latar Belakang | Perayaan Natal Nasional Partai Gerindra merupakan kegiatan keagamaan dan kebersamaan yang diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan Natal secara nasional oleh Partai Gerindra. Kegiatan ini juga menjadi momentum silaturahmi antara unsur partai, pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Pada kesempatan tersebut turut dilaksanakan pertemuan dengan Bapak Hashim S. Djojohadikusumo selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, yang memiliki peran dalam mendukung agenda strategis nasional di bidang energi dan perubahan iklim. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Kegiatan ini dihadiri sebagai bentuk partisipasi dalam perayaan keagamaan nasional serta untuk membangun komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai pihak, termasuk dalam pertemuan dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi terkait isu-isu strategis pembangunan, energi, dan keberlanjutan. |
| Peserta Kegiatan | Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota BPP PBD dan jajaran Partai Gerindra, unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi dan Harmonisasi |
| Misi/Keterangan | Papua Polhukam/Damai dan Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah dan perayaan Natal Nasional Partai Gerindra yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pertemuan dan komunikasi dengan Bapak Hashim S. Djojohadikusumo selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi serta diskusi terkait arah pembangunan nasional, khususnya dalam konteks energi dan isu keberlanjutan yang |

| | |
|--|---|
| | memiliki relevansi terhadap pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. |
| Hasil Kegiatan | Kegiatan perayaan dan pertemuan berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh suasana kebersamaan. Terjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan Utusan Khusus Presiden, dalam rangka mendukung sinergi pembangunan di daerah. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Hasil komunikasi dan pertemuan menjadi bagian dari penguatan jejaring serta koordinasi lintas pihak dalam mendukung agenda pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, khususnya di bidang energi dan keberlanjutan. |
| Dokumentasi |  |



Kegiatan 5

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Rapat Penyelesaian Permasalahan Pulau Sayang, Piyai dan Kiyas Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Kamis, 8 Januari 2026 Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya |
| Latar Belakang | <p>Rapat ini dilaksanakan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan paparan dari Tim Pengumpul dan Penyusun Dokumen 3 (tiga) Pulau Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang telah menyiapkan dokumen dan data pendukung sebagai dasar perjuangan dalam pertemuan yang akan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 2. Menyatukan langkah Forkopimda Papua Barat Daya untuk mempertahankan batas wilayah yang dibangun berdasarkan dokumen sah dan sejarah administrasi. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan saran dan masukan dalam proses pengumpulan serta penyusunan dokumen pendukung administratif dan historis terkait hak wilayah atas ketiga pulau dimaksud. 2. Mengikuti rapat koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, DPR Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua (MRP), Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, serta perwakilan masyarakat adat. 3. Mendorong dan mengoordinasikan bersama Tim Penyusun Dokumen 3 Pulau Provinsi Papua Barat Daya agar dilakukan pertemuan dengan Kemendagri dan tim pusat. 4. Mengidentifikasi langkah alternatif apabila mediasi administratif tidak berjalan sebagaimana diharapkan. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur dan pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 2. Anggota BPP PBD dan Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya 3. Perwakilan DPR Papua Barat Daya 4. Majelis Rakyat Papua (MRP) 5. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat 6. Pemerintah Kabupaten Sorong |

| | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 7. Perwakilan masyarakat adat dan tokoh lokal 8. Tim teknis penyusun dokumen dan data pendukung |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi dokumen dan data administratif atas kepemilikan tiga pulau yang dinyatakan telah kuat dan dilengkapi dengan bukti historis. 2. Strategi advokasi kepada Kemendagri untuk memfasilitasi dialog antarprovinsi antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara. 3. Koordinasi internal dengan MRP dan DPR Papua Barat Daya guna memperkuat landasan politik dan hukum. 4. Respons terhadap klaim wilayah yang berbeda dari Provinsi Maluku Utara. 5. Rencana langkah-langkah alternatif apabila proses mediasi belum memberikan keputusan definitif, termasuk dukungan politik dari gubernur se-Tanah Papua. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya konsolidasi berbagai pihak (Pemerintah Provinsi, DPR Papua Barat Daya, MRP, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dan Pemerintah Kabupaten Sorong) dalam penyusunan strategi wilayah. 2. Dokumen dan data dukung administratif yang substansial dinyatakan telah siap sebagai dasar perjuangan. 3. Adanya kesepakatan prinsip dari Forkopimda Papua Barat Daya untuk terus memperjuangkan ketiga pulau dimaksud, termasuk melalui upaya alternatif apabila jalur administratif belum membuahkan solusi. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk segera menjadwalkan pertemuan formal dengan Kemendagri guna memulai mediasi resmi antarprovinsi. 2. Meminta Tim Kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk melengkapi dan memfinalisasi dokumen tambahan yang diperlukan dalam menghadapi proses verifikasi data dari Provinsi Maluku Utara. |

3. Mendorong dukungan politik melalui dialog dengan gubernur lain di Tanah Papua serta penguatan masukan dari DPR Papua Barat Daya dan MRP.
4. Membantu penyusunan strategi komunikasi publik yang bertanggung jawab guna memberikan pemahaman kepada masyarakat di ketiga pulau dan Kabupaten Raja Ampat terkait status dan langkah kebijakan yang ditempuh.
5. Mengikuti tahapan kerja advokasi sesuai ketentuan hukum nasional guna mendorong tertib administrasi serta menghindari eskalasi konflik horizontal antar masyarakat.

Dokumentasi

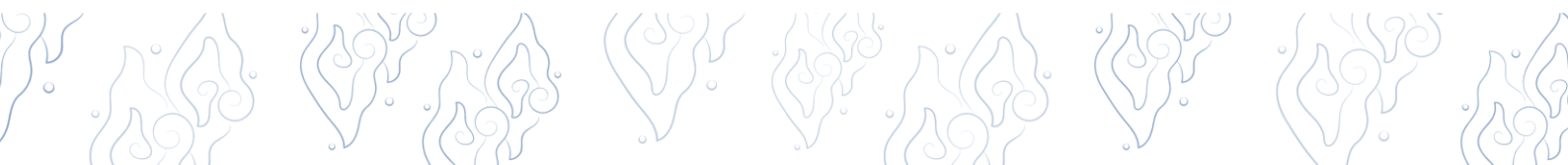


Kegiatan 6

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Audiensi/Pertemuan bersama Gubernur Papua Barat Daya dan Tim/Staf |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 13 Januari 2026 Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya |
| Latar Belakang | <p>Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti permasalahan aset terkait lokasi pembangunan RS Siloam di Kota Sorong, khususnya untuk memastikan keabsahan dan keberadaan sertifikat asli tanah dimaksud. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi bagian dari koordinasi lanjutan antara Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, BP3OKP, dan pihak RS Siloam guna memastikan kelanjutan rencana pembangunan rumah sakit tersebut.</p> <p>Di sisi lain, audiensi ini dimanfaatkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan peran dan tugas BPP selama Tahun 2025 di wilayah Papua Barat Daya, serta mengidentifikasi agenda prioritas yang memerlukan sinergi dan tindak lanjut bersama antara BPP dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.</p> |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan keabsahan dan melacak keberadaan sertifikat asli tanah lokasi pembangunan RS Siloam serta membahas rencana tindak lanjut pertemuan antara Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, BP3OKP, dan pihak RS Siloam. 2. Menyampaikan laporan peran dan tugas yang telah dilaksanakan BPP selama Tahun 2025 di wilayah Papua Barat Daya. 3. Mengidentifikasi agenda prioritas yang memerlukan tindak lanjut kolaboratif antara BPP dan Pemerintah Provinsi. 4. Memperkuat sinergi pelaksanaan misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. 5. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan layanan dasar masyarakat. 6. Menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagai komitmen bersama lintas pemangku kepentingan. |
| Peserta Kegiatan | Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, OPD terkait, Anggota BPP PBD |

| | |
|---|--|
| | beserta Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keabsahan dan penelusuran sertifikat asli tanah lokasi pembangunan RS Siloam serta mekanisme peralihan aset antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kota Sorong. 2. Rencana pertemuan lanjutan antara Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, BP3OKP, dan pihak RS Siloam. 3. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan peran BPP Tahun 2025 di wilayah Papua Barat Daya. 4. Agenda prioritas percepatan pembangunan, termasuk pembangunan RS Siloam dan koridor jalan Susumuk–Bintuni serta Fev–Mare. 5. Penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. 6. Kebutuhan mekanisme koordinasi rutin antara BPP dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi mengakomodir dan memfasilitasi proses peralihan aset antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kota Sorong. Pemerintah Provinsi juga memfasilitasi Dapodik Guru PPPK, serta akan melakukan tindak lanjut terkait Jalan Susumuk–Bintuni dan Fev–Mare. 2. BPP ditegaskan memiliki peran strategis sebagai penghubung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua di Papua Barat Daya. 3. Pembangunan RS Siloam dan koridor Susumuk–Bintuni menjadi agenda prioritas bersama. 4. Sinergi lintas sektor perlu diperkuat untuk memastikan pembangunan berdampak langsung pada masyarakat. |

| | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Misi Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif perlu diterjemahkan ke dalam program konkret yang terukur. 6. Diperlukan mekanisme koordinasi rutin antara BPP dan Pemerintah Provinsi. |
| <p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pertemuan lanjutan pada tanggal 20 Januari 2026. 2. Pembentukan tim koordinasi percepatan pembangunan strategis Papua Barat Daya. 3. Penyusunan roadmap tindak lanjut pembangunan RS Siloam. 4. Pembentukan forum koordinasi lintas wilayah untuk percepatan koridor Susumuk–Bintuni. 5. Integrasi data sektoral sebagai dasar perencanaan. 6. Monitoring berkala program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. 7. Penguatan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait. 8. Pelaporan periodik hasil percepatan pembangunan kepada pimpinan daerah. |
| <p>Dokumentasi</p> |  |




Kegiatan 7

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Pertemuan dengan Bupati Sorong Selatan |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Minggu, 18 Januari 2026 Kediaman Anggota BPP Papua Barat Daya |
| Latar Belakang | Pertemuan dengan Bupati Sorong Selatan dilaksanakan sebagai bagian dari komunikasi dan koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dengan pemerintah kabupaten dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di wilayah Sorong Selatan. Koordinasi lintas pemerintahan menjadi penting untuk memastikan keselarasan program dan prioritas pembangunan antara pemerintah daerah dan BPP dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, serta membahas berbagai isu pembangunan daerah yang memerlukan sinergi dan dukungan bersama dalam kerangka percepatan pembangunan. |
| Peserta Kegiatan | Pertemuan dihadiri oleh Bupati Sorong Selatan dan Anggota BPP PBD |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan dialog terbuka. Dalam kesempatan tersebut dibahas berbagai isu pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan, termasuk kebutuhan infrastruktur, pelayanan dasar, serta dukungan terhadap program prioritas daerah. Pertemuan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi mengenai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan secara kolaboratif guna mendukung percepatan pembangunan di wilayah Sorong Selatan. |
| Hasil Kegiatan | Pertemuan berlangsung dengan baik dan menghasilkan komitmen untuk memperkuat koordinasi serta komunikasi antara BPP Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten |

| | |
|--|---|
| | Sorong Selatan dalam mendukung agenda pembangunan daerah. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Hasil pertemuan akan menjadi dasar penguatan koordinasi lanjutan serta tindak lanjut terhadap agenda pembangunan yang memerlukan dukungan dan sinergi antara BPP dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. |
| Dokumentasi |  <p>A photograph showing two men shaking hands in front of a decorated Christmas tree. The man on the left is wearing a grey polo shirt and glasses, while the man on the right is wearing a light blue button-down shirt with a tree logo and glasses. A Santa Claus figurine is visible on the left, and a brown leather sofa is on the right.</p> |

Kegiatan 8

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Seminar Nasional “Membangun Indonesia Dari Timur” Kegiatan Gekira Partai Gerindra |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Jum’at, 16 Januari 2026 Vega Hotel Sorong |
| Latar Belakang | Seminar Nasional bertajuk “Membangun Indonesia Dari Timur” yang diselenggarakan oleh Gekira Partai Gerindra merupakan forum diskusi yang menghadirkan berbagai unsur pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk membahas strategi pembangunan kawasan timur Indonesia, khususnya Papua. Kegiatan ini menjadi ruang pertukaran gagasan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkeadilan. |

| | |
|--|--|
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Kegiatan ini dihadiri sebagai bentuk partisipasi dalam forum diskusi nasional yang membahas pembangunan Indonesia dari wilayah timur, sekaligus untuk menyerap pandangan, gagasan, dan arah kebijakan yang relevan dengan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. |
| Peserta Kegiatan | Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota BPP PBD dan unsur penyelenggara dari Gekira Partai Gerindra, narasumber, perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta undangan lainnya. |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif, Papua Cerdas |
| Poin-Poin Pembahasan | Seminar membahas pentingnya penguatan peran kawasan timur Indonesia dalam pembangunan nasional, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Diskusi juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia. |
| Hasil Kegiatan | Kegiatan seminar berlangsung dengan lancar dan memberikan ruang dialog serta pertukaran pandangan mengenai arah pembangunan Indonesia dari wilayah timur, khususnya Papua Barat Daya. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Hasil seminar menjadi bahan referensi dalam memperkuat sinergi dan koordinasi pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung agenda percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. |
| Dokumentasi |  |



Kegiatan 9

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Rapat Percepatan Penyelesaian RAP OTSUS TA 2026 (Daring) |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Kamis, 22 Januari 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya |
| Latar Belakang | Rapat ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penyelesaian Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026. Penyusunan RAP Otsus merupakan bagian penting dalam memastikan alokasi anggaran berjalan sesuai prioritas pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat waktu yang terbatas serta pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, diperlukan koordinasi secara daring guna memastikan proses penyusunan dan finalisasi RAP Otsus TA 2026 berjalan tepat waktu dan sesuai mekanisme yang berlaku. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian RAP Otsus Tahun Anggaran 2026, menyelaraskan substansi program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan Otonomi Khusus, serta memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian perencanaan anggaran dengan arah kebijakan nasional dan daerah. |
| Peserta Kegiatan | Rapat diikuti oleh unsur terkait dalam penyusunan dan penganggaran Otonomi Khusus, termasuk perwakilan BPP Papua Barat Daya serta pihak-pihak terkait lainnya melalui mekanisme daring. |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Pelaksanaan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian RAP Otsus TA 2026. |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | Rapat dilaksanakan secara daring dengan fokus pada progres penyusunan RAP Otsus TA 2026, termasuk pembahasan kesesuaian program prioritas dengan kerangka kebijakan percepatan pembangunan Papua. Dalam rapat dibahas pula aspek kelengkapan dokumen, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta langkah-langkah percepatan yang perlu dilakukan agar proses finalisasi dapat diselesaikan sesuai |

| | |
|--|---|
| | jadwal. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa program yang diusulkan benar-benar mendukung implementasi misi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai. |
| Hasil Kegiatan | Rapat menghasilkan kesepakatan mengenai langkah-langkah percepatan penyelesaian RAP Otsus TA 2026 serta komitmen untuk menindaklanjuti perbaikan dan penyempurnaan dokumen yang masih diperlukan agar proses finalisasi dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | Diperlukan tindak lanjut berupa percepatan penyempurnaan dokumen RAP Otsus TA 2026, penguatan koordinasi lintas pihak, serta pemantauan progres penyelesaian agar penetapan anggaran dapat dilakukan tepat waktu dan selaras dengan prioritas pembangunan Otonomi Khusus Papua. |
| Dokumentasi |  |

Kegiatan 10

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Rapat Virtual/Daring bersama IIK Bhakta Kediri |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Senin, 19 Januari 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya |
| Latar Belakang | Kebutuhan serta percepatan pengadaan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya menjadi salah satu prioritas dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Keterbatasan jumlah tenaga |

| | |
|---|--|
| | <p>kesehatan di daerah mendorong perlunya sinergi dengan institusi pendidikan untuk membuka akses pendidikan melalui program beasiswa bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP).</p> |
| <p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p> | <p>Melakukan sinergi dan sosialisasi program bantuan beasiswa pendidikan di bidang kesehatan bagi putra-putri OAP sebagai bagian dari upaya percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah.</p> |
| <p>Peserta Kegiatan</p> | <p>Kegiatan dihadiri oleh pihak IIK Bhakta Kediri, BPP Papua Barat Daya (Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif), serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya.</p> |
| <p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p> | <p>Koordinasi</p> |
| <p>Misi/Keterangan</p> | <p>Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif</p> |
| <p>Poin-Poin Pembahasan</p> | <p>Pembahasan difokuskan pada skema beasiswa yang ditawarkan, yaitu beasiswa penuh dan beasiswa parsial bagi calon mahasiswa di bidang kesehatan.</p> |
| <p>Hasil Kegiatan</p> | <p>Disepakati akan dilakukan pertemuan lanjutan dalam bentuk visitasi ke IIK Bhakta Kediri. Selain itu, direncanakan pertemuan sosialisasi dengan pemerintah kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrau, dan Raja Ampat.</p> |
| <p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p> | <p>Akan dilakukan pertemuan lanjutan dengan Dinas Kesehatan Kota Sorong untuk melakukan sinkronisasi program beasiswa pelajar dengan program beasiswa dari IIK Bhakta Kediri.</p> |
| <p>Dokumentasi</p> |  <p>The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a presentation slide is displayed with the text: "Di IIK Bhakta Kamu Bisa Menjadi Pahlawan Sesungguhnya !!!" and the hashtag "#BhaktaHeroes". The slide features several images of healthcare workers in various settings. On the right, a grid of video thumbnails shows multiple participants in the meeting. The Zoom control bar at the bottom includes icons for audio, video, participants, chat, react, share, apps, refresh, and more.</p> |

Kegiatan 11

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Pertemuan dengan Danzipur |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Kamis, 22 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | Dilakukan koordinasi terkait pengembangan infrastruktur di wilayah konflik, khususnya di Aifat Timur. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Melakukan komunikasi awal dengan pihak keamanan terkait usulan pembangunan serta dukungan keamanan terhadap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di wilayah konflik. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya, Drs. Otto Ihalauw, MA 2. Komandan Batalyon Zeni Tempur 20/Pawbili Pelle Alang, Mayor Czi Coko Sasongko. S.Hub., M.Sc., MPM-DevSec 3. Pokja Produktif BPP PBD |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian informasi mengenai respons dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan Jalan Susumuk–Bintuni, yang diperoleh melalui pertemuan pada tanggal 27 Desember 2025 bersama masyarakat dan para tokoh agama (Uskup Manokwari–Sorong) di wilayah konflik, Ayata, Aifat Timur. 2. Koordinasi awal pada tataran pelaksana lapangan terkait dukungan pengamanan dalam proses pembangunan infrastruktur di wilayah konflik. 3. Usulan kegiatan pembangunan jembatan gantung dengan anggaran dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di wilayah-wilayah terpencil. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan dukungan dari Komandan Batalyon Zeni Tempur 20/Pawbili Pelle Alang, Mayor Czi Coko Sasongko, S.Hub., M.Sc., MPM-DevSec, terkait proses pembangunan |

| | |
|--|---|
| | <p>infrastruktur di wilayah konflik pada tataran pelaksanaan lapangan;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Mendapatkan dukungan untuk mengoordinasikan data koordinat wilayah yang akan dibangun jembatan. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none">1. Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait anggaran pergeseran pasukan dalam rangka pelaksanaan pengamanan di wilayah konflik.2. Melakukan koordinasi dengan enam wilayah bawahan di Provinsi Papua Barat Daya terkait koordinat pembangunan jembatan gantung. |
| Dokumentasi |  |

Kegiatan 12

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Pertemuan dengan Kepala Distrik Aifat Timur (Kabupaten Maybrat) |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Kamis, 22 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | <p>Distrik Aifat Timur Jauh merupakan salah satu distrik di Kabupaten Maybrat yang memiliki karakteristik wilayah terpencar dengan keterbatasan akses transportasi, layanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar serta terbatasnya jangkauan pelayanan publik bagi masyarakat kampung.</p> <p>Keterbatasan akses tersebut berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia, mobilitas ekonomi masyarakat, serta ketahanan sosial wilayah. Oleh karena itu, Distrik Aifat Timur Jauh memerlukan dukungan pembangunan yang terfokus pada percepatan agenda Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan berbasis wilayah.</p> <p>Selain itu, rencana pembangunan jalan strategis yang menghubungkan wilayah Susumuk dan Bintuni menjadi faktor penting dalam membuka keterisolasian wilayah. Konektivitas ini diharapkan memberikan dampak terhadap pengembangan ekonomi kampung, distribusi barang dan jasa, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur tersebut selaras dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat Distrik Aifat Timur Jauh.</p> |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kondisi eksisting aksesibilitas, pendidikan, dan kesehatan di Distrik Aifat Timur Jauh. 2. Memperkuat koordinasi percepatan pembangunan wilayah terpencil. |

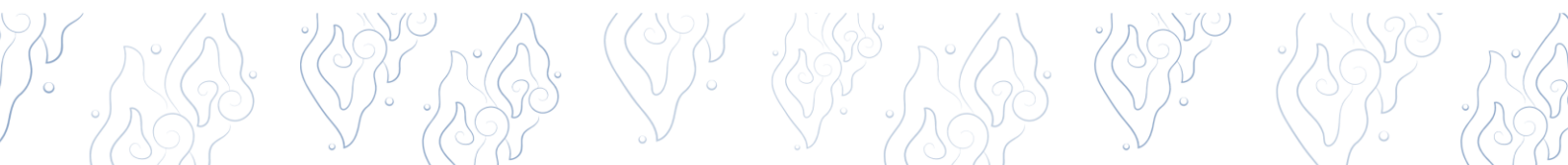
| | |
|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun strategi intervensi pembangunan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. 4. Mengkaji dampak rencana pembangunan Jalan Susumuk–Bintuni terhadap ekonomi kampung. 5. Menghimpun rekomendasi lintas sektor untuk percepatan pembangunan distrik. |
| Peserta Kegiatan | Anggota pokja Papua Produktif, Kepala Distrik Aifat Timur |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas Wilayah Distrik Aifat Timur Jauh masih menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi yang menghambat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta jangkauan pelayanan publik. 2. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Ketersediaan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan belum merata. Jarak antarkampung serta keterbatasan fasilitas menyebabkan rendahnya akses terhadap layanan dasar. 3. Pengembangan Ekonomi Kampung Keterisolasian wilayah membatasi akses pasar dan nilai tambah komoditas lokal. Pembukaan konektivitas Susumuk–Bintuni berpotensi menjadi katalis dalam pengembangan ekonomi berbasis kampung. 4. Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk memastikan integrasi pembangunan infrastruktur, layanan sosial, serta penguatan ekonomi lokal. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Distrik Aifat Timur Jauh memerlukan intervensi pembangunan terpadu berbasis peningkatan aksesibilitas. 2. Percepatan pembangunan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif perlu difokuskan pada distrik terpencil. |

| | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Jalan Susumuk–Bintuni memiliki nilai strategis dalam membuka konektivitas ekonomi wilayah. 4. Koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan wilayah. 5. Penguatan ekonomi kampung menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. |
| <p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan pembangunan akses jalan penghubung distrik dalam perencanaan daerah. 2. Menambah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan berbasis distrik terpencil. 3. Mengintegrasikan program ekonomi kampung dengan pembangunan konektivitas wilayah. 4. Membentuk tim koordinasi percepatan pembangunan Distrik Aifat Timur Jauh. 5. Menyinkronkan program pusat, provinsi, dan kabupaten dalam kerangka Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala berbasis indikator pembangunan distrik. |
| <p>Dokumentasi</p> |  <p>The image shows two men shaking hands in front of a large blue banner. The banner features the logos of the Indonesian government (a star in a circle) and West Papua province (a shield with a star and a bird). The text on the banner reads 'PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPANUA (BP3OKP)'. The man on the left is wearing a purple batik shirt, and the man on the right is wearing a white shirt. They are standing in front of a table, and a chair is visible in the background.</p> |

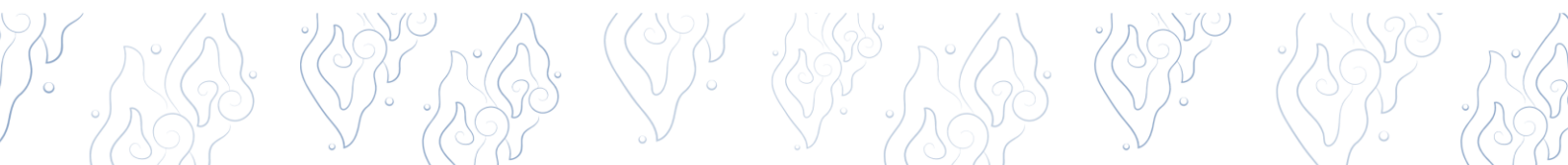
Kegiatan 13

| | |
|--|--|
| Nama Kegiatan | Audiensi dengan Kepala Suku Abun Kabupaten Tambrauw |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 27 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | Pertemuan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan terkait infrastruktur jalan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kejelasan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi masyarakat adat di wilayah Abun, Kabupaten Tambrauw. Kondisi akses jalan yang rusak serta terbatasnya manfaat ekonomi dari kawasan konservasi menjadi perhatian utama masyarakat adat. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan secara langsung aspirasi Kepala Suku Abun terkait infrastruktur dan pengelolaan kawasan konservasi. 2. Membahas kendala pembangunan jalan nasional di wilayah Sausapor–Werur–Kwoor dan sekitarnya. 3. Mengklarifikasi isu pengelolaan DBH Migas dan Dana Otsus bagi masyarakat adat. 4. Menyepakati langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan bersama. |
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Pokja Papua Produktif 3. Kepala Suku Abun |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Harmonisasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Jalan Nasional <ul style="list-style-type: none"> ● Ruas Sausapor–Kwoor dalam kondisi rusak. ● Ruas Werur–Kwoor selama ±15 tahun belum mendapat perhatian, meskipun termasuk jalan nasional. |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Distrik Kwesefo belum terhubung akses jalan karena berada di kawasan konservasi. ● Akses yang sulit menyebabkan biaya transportasi sangat mahal (contoh: Sausapor–Kwoor Rp500.000/orang). ● Dana kampung banyak terserap untuk sewa helikopter akibat sulitnya akses darat. ● Terdapat harapan agar dalam pelaksanaan pembangunan jalan, Balai Jalan melibatkan Kepala Suku Abun. <p>2. Kawasan Konservasi dan Penyus Belimbing</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kwoor merupakan daerah konservasi penyus belimbing. ● Pengelolaan kawasan konservasi dinilai belum memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. ● Perlu adanya transparansi penggunaan dana oleh lembaga/NGO pengelola, seperti WWF. ● Direncanakan Musyawarah Besar (Mubes) Suku Abun pada tahun 2027 untuk membahas isu konservasi dan penyus belimbing. <p>3. DBH Migas dan Dana Otsus</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat ketentuan 10% Dana Otsus untuk pembinaan masyarakat adat. ● Kepala suku di Tambrauw menyampaikan belum adanya kejelasan terkait penerimaan 10% tersebut. ● Diperlukan klarifikasi mengenai penggunaan dan penyaluran DBH Migas serta Dana Otsus bagi masyarakat adat. <p>4. Penjelasan dari BPP</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Usulan pembangunan jalan akan dijelaskan secara tertulis dengan menyebutkan ruas jalan yang dimaksud. ● BPP telah melaksanakan SHEK untuk izin pinjam pakai kawasan di lima distrik, termasuk Kwoor. |
|--|---|



| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Syarat utama pembangunan jalan adalah status tanah harus clean and clear (ganti rugi diselesaikan pemerintah daerah) serta adanya jaminan keamanan wilayah. ● Akan dilakukan koordinasi dengan Dirjen Bina Marga terkait data usulan pembangunan jalan. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspirasi Kepala Suku Abun terkait perbaikan jalan nasional dan keterlibatan adat dalam pembangunan telah dicatat untuk ditindaklanjuti 2. Disepakati perlunya transparansi dalam pengelolaan kawasan konservasi agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi. 3. Permasalahan DBH Migas dan Dana Otsus akan dilakukan penelusuran serta klarifikasi lebih lanjut dengan instansi terkait. 4. BPP akan menyampaikan usulan pembangunan jalan secara resmi dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. BPP melakukan koordinasi dengan Dirjen Bina Marga terkait usulan perbaikan ruas Sausapor–Werur–Kwoor. 2. BPP melakukan pengecekan ke ESDM Papua Barat Daya terkait DBH Migas, khususnya pengalaman penanganan di wilayah ring 1 (Klamono dan sekitarnya). 3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Keuangan Papua Barat Daya untuk klarifikasi penyaluran 10% Dana Otsus bagi masyarakat adat di Tambrau. 4. Mendukung rencana Mubes Suku Abun tahun 2027 sebagai forum pembahasan konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. |



Dokumentasi



Kegiatan 14

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Audiensi dengan Kepala Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat beserta Kepala Kampung dan Tokoh Adat |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Selasa, 27 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | Audiensi dengan Kepala Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat beserta kepala kampung dan tokoh adat merupakan tindak lanjut dari diskusi dan koordinasi sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2026 terkait rencana pembangunan jalan dalam koridor Susumuk–Bintuni. Rencana pembangunan jalan tersebut memiliki nilai strategis dalam membuka keterisolasian wilayah, |

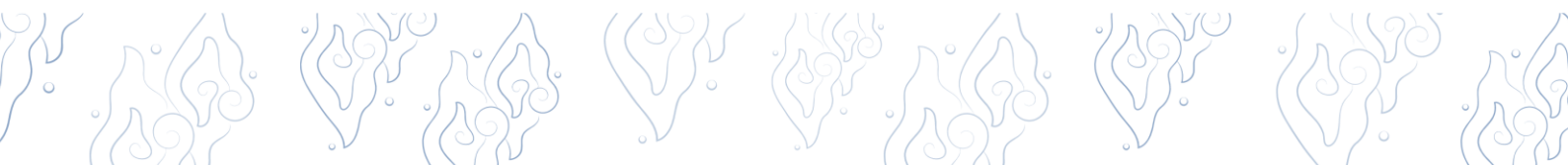
| | |
|---|---|
| | <p>memperkuat konektivitas antarkampung, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat Distrik Aifat Timur Jauh.</p> <p>Beberapa kampung utama, seperti Kampung Ainesra, Aikingking, dan kampung-kampung sekitarnya, masih mengalami keterbatasan akses jalan yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi barang kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi kampung.</p> <p>Dukungan tokoh masyarakat dan pemilik hak ulayat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur di wilayah adat. Oleh karena itu, audiensi ini dilaksanakan untuk membangun kesepahaman bersama, memperkuat legitimasi sosial, serta memastikan rencana pembangunan jalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat kampung.</p> |
| <p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan komunikasi antara pemerintah distrik dan masyarakat adat terkait rencana pembangunan jalan. 2. Menghimpun dukungan tokoh masyarakat terhadap koridor jalan Susumuk–Bintuni. 3. Mengidentifikasi kebutuhan akses jalan kampung prioritas di Distrik Aifat Timur Jauh. 4. Membangun kesepahaman mengenai manfaat pembangunan jalan bagi masyarakat kampung. 5. Menyusun langkah koordinasi lanjutan untuk percepatan pembangunan. |
| <p>Peserta Kegiatan</p> | <p>Kepala Distrik Aifat Timur Jauh, Tokoh Masyarakat, kepala kampung, anggota pokja</p> |
| <p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p> | <p>Koordinasi</p> |
| <p>Misi/Keterangan</p> | <p>Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai</p> |
| <p>Poin-Poin Pembahasan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Masyarakat Adat Tokoh adat dan kepala kampung menyampaikan bahwa |

| | |
|---|---|
| | <p>akses jalan merupakan kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian wilayah. Dukungan diberikan sepanjang proses pembangunan menghormati hak adat serta melibatkan masyarakat setempat.</p> <p>2. Prioritas Kampung Terlayani Akses Jalan Kampung Ainesra, Aikingking, dan beberapa kampung lainnya diidentifikasi sebagai wilayah prioritas yang membutuhkan akses jalan guna mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.</p> <p>3. Dampak Ekonomi Kampung Akses jalan dipandang sebagai faktor penting dalam peningkatan ekonomi kampung melalui kemudahan transportasi hasil pertanian, perdagangan lokal, dan mobilitas tenaga kerja.</p> <p>4. Koordinasi Lintas Pihak Ditekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah distrik, kabupaten, pemangku adat, dan instansi teknis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan.</p> |
| <p>Hasil Kegiatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapai dukungan prinsip dari tokoh adat dan kepala kampung terhadap rencana pembangunan jalan. 2. Disepakati bahwa akses jalan merupakan kebutuhan prioritas distrik. 3. Kampung Ainesra dan Aikingking diidentifikasi sebagai wilayah prioritas konektivitas awal. 4. Pembangunan jalan dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kampung. 5. Tercapai kesepahaman bahwa pembangunan harus menghormati hak adat serta melibatkan masyarakat lokal. |
| <p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti dukungan masyarakat melalui kajian teknis trase jalan prioritas. 2. Melakukan konsultasi adat formal terkait hak ulayat. 3. Mengintegrasikan pembangunan jalan dalam perencanaan daerah. 4. Membentuk tim koordinasi pembangunan berbasis distrik. 5. Menyusun rencana aksi bertahap pembangunan akses kampung. |

| | |
|-------------|---|
| | 6. Melakukan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat kampung. |
| Dokumentasi |  |



Kegiatan 15

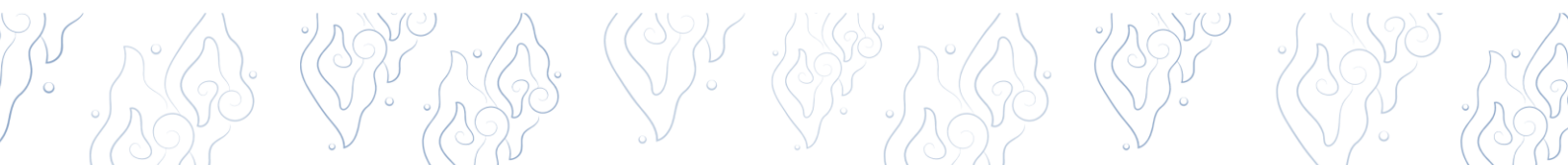
| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Rapat bersama Bapperida Provinsi Papua Barat Daya terkait Penyusunan Ranwal RKP dan RKPD Tahun 2027 |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Kamis, 29 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | Rapat dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi antara BP3OKP dan Bapperida Provinsi Papua Barat Daya terkait penyesuaian dokumen perencanaan daerah dengan |



| | |
|--|--|
| | kebijakan nasional. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memastikan sinkronisasi RPJMD, RPJPD, dan RKPD, serta kesiapan daerah dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKP dan penyambutan tim Bappenas pada Februari 2026. |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelaraskan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota dengan RPJMN 2025–2029. 2. Membahas kesiapan penyusunan Ranwal RKPD dan RKP. 3. Mengidentifikasi kendala dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. 4. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. |
| Peserta Kegiatan | Bapperida PBD: Kepala Bidang Fispra, Kepala Subbidang Otsus, Kepala Bidang Sosial dan Budaya, Admin Bapperida. BPP: Anggota BPP PBD, Pokja Sehat, Cerdas, Produktif |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | <ul style="list-style-type: none"> ● Perlu sinkronisasi antara RPJMN, RPJPD, dan RPJMD, termasuk penyesuaian dengan prioritas nasional (lokpri), seperti penanganan penyakit endemik (TBC, malaria, dan lainnya). ● Perda RPJMD Provinsi Papua Barat Daya belum disampaikan kepada BP3OKP dan perlu segera dikirim. ● Proses RPJMD provinsi telah memasuki tahap akhir dan dalam proses penguncian aplikasi, namun masih terdapat beberapa koreksi yang memerlukan penyesuaian. ● Ranwal RKPD telah disampaikan kepada kabupaten/kota, namun Renstra OPD kabupaten/kota belum seluruhnya selesai. ● RPJPD Provinsi Papua Barat Daya telah ditetapkan. |

| | |
|------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Status RPJMD Kabupaten Sorong Selatan dikembalikan ke tahap ranwal karena kendala komunikasi antara provinsi dan Kabupaten Sorong Selatan. ● DAK kembali tersentralisasi ke pusat, sehingga daerah perlu memastikan usulan masuk dalam RKP nasional. ● Beberapa kabupaten/kota belum menyiapkan dokumen pendukung seperti DED dan KAK dalam pengajuan usulan kegiatan. ● Pemanfaatan SIPD belum optimal sehingga terjadi perbedaan data kebutuhan, terutama saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek). ● Pengurangan alokasi DTI PBD akibat SILPA tahun sebelumnya berdampak pada menurunnya anggaran infrastruktur, yang sebagian besar dialihkan untuk rekonstruksi jalan. ● Usulan dukungan pembangunan ruas jalan Susumuk–Bintuni dan Mare–Feef agar masuk dalam perencanaan nasional. ● Pokja Sehat mengusulkan penambahan subindikator untuk memisahkan data OAP dan non-OAP pada indikator kesehatan, seperti malaria. ● Usulan pembangunan rumah sakit vertikal di Papua Barat Daya untuk mengurangi beban fiskal daerah dalam pembiayaan layanan kesehatan dasar |
| <p>Hasil Kegiatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bapperida akan menindaklanjuti masukan dari BP3OKP terkait penyelarasan dokumen perencanaan. 2. Akan dilakukan koordinasi lanjutan dalam rangka penyusunan Ranwal RKP dan persiapan pertemuan dengan Bappenas. 3. Diperlukan perbaikan dan penyesuaian isi RPJMD agar selaras dengan misi gubernur dan kebijakan pusat 4. Diperlukan penguatan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota untuk menghindari miskomunikasi dalam proses penyusunan dokumen. |

| | |
|---|--|
| | <p>5. Disepakati pentingnya kelengkapan data dukung dalam setiap usulan kegiatan agar dapat diterima di tingkat pusat.</p> |
| <p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bapperida Provinsi segera menyampaikan Perda RPJMD kepada BP3OKP. 2. Mengumpulkan Bapperida dan Bappeda kabupaten/kota untuk sinkronisasi Ranwal RKPD dan persiapan RKP. 3. Meningkatkan pemanfaatan SIPD serta menyiapkan dokumen pendukung (DED dan KAK) dalam setiap usulan. 4. Melakukan koordinasi intensif menjelang kunjungan Bappenas dengan melibatkan seluruh pihak terkait. 5. Mendorong pengusulan pembangunan ruas jalan prioritas dan rumah sakit vertikal agar masuk dalam perencanaan nasional (RKP). |
| <p>Dokumentasi</p> |   |

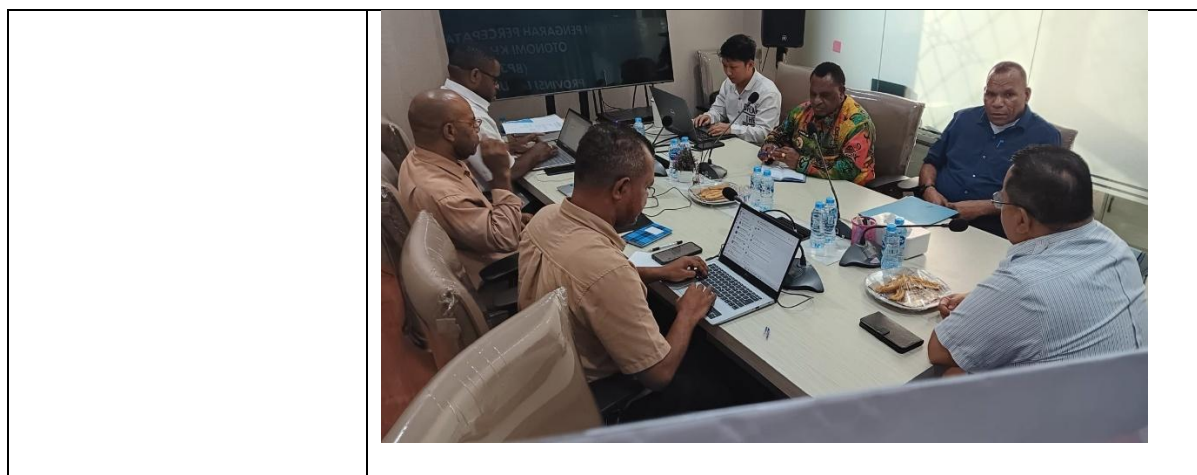


Kegiatan 16

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Pertemuan dengan Bupati Maybrat |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Kamis, 29 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | <p>Pembangunan ruas jalan Susumuk–Bintuni merupakan salah satu program strategis dalam upaya memperkuat konektivitas antara Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya dengan wilayah Bintuni di Provinsi Papua Barat. Ruas jalan ini memiliki peran penting dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendorong pengembangan potensi ekonomi kawasan.</p> <p>Percepatan pembangunan ruas jalan lintas wilayah dan lintas kewenangan tersebut memerlukan kesamaan persepsi serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek teknis dan administratif. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kesiapan lahan, dukungan sosial masyarakat, serta kelengkapan administrasi perencanaan.</p> <p>Dalam konteks tersebut, pertemuan dengan Bupati Maybrat dilaksanakan untuk menyamakan persepsi terkait urgensi dan strategi pembangunan ruas jalan Susumuk–Bintuni, sekaligus menegaskan peran BP3OKP dalam mendorong koordinasi aktif antara Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Balai Jalan Nasional Papua Barat serta Papua Barat Daya.</p> |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyamakan persepsi antara Pemerintah Kabupaten Maybrat dan BP3OKP terkait pembangunan ruas jalan Susumuk–Bintuni. 2. Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional dan regional. 3. Mendorong koordinasi teknis dan administratif dengan Balai Jalan Nasional Papua Barat dan Papua Barat Daya. |

| | |
|---|--|
| | <p>4. Mengidentifikasi peran dan kontribusi pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan ruas jalan.</p> <p>5. Merumuskan langkah tindak lanjut koordinasi lintas instansi.</p> |
| Peserta Kegiatan | Anggota BPP PBD, Pokja Produktif BPP PBD, Bupati Maybrat, Asisten 2 Bid Pemerintahan Kab Maybrat |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Sinkronisasi, Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai |
| Poin-Poin Pembahasan | <p>1. Urgensi Pembangunan Ruas Jalan Susumuk–Bintuni Disepakati bahwa ruas jalan ini memiliki nilai strategis dalam membuka konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi logistik, serta mendukung pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman Kabupaten Maybrat.</p> <p>2. Peran BP3OKP BP3OKP memiliki peran dalam mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi antara pemerintah daerah dan instansi teknis pusat, khususnya Balai Jalan Nasional.</p> <p>3. Peran Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Maybrat diharapkan berperan aktif dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mendukung kesiapan administrasi perencanaan; ● Memfasilitasi penyelesaian aspek sosial dan lahan; ● Membangun komunikasi dengan masyarakat dan pemangku adat; ● Mengintegrasikan pembangunan jalan dengan pengembangan ekonomi wilayah. <p>4. Koordinasi Teknis dan Administratif Ditekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Balai Jalan Nasional Papua Barat dan Papua Barat Daya agar tahapan perencanaan,</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan berjalan selaras.</p> |
| <p>Hasil Kegiatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapai kesamaan persepsi mengenai pentingnya pembangunan ruas jalan Susumuk–Bintuni. 2. Pemerintah Kabupaten Maybrat menyatakan komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan. 3. BP3OKP diposisikan sebagai fasilitator koordinasi lintas instansi dan lintas wilayah. 4. Pembangunan ruas jalan dipandang sebagai pengungkit konektivitas dan pengembangan potensi daerah. 5. Diperlukan koordinasi teknis dan administratif yang intensif untuk mempercepat realisasi program. |
| <p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti pertemuan dengan rapat koordinasi teknis bersama Balai Jalan Nasional Papua Barat dan Papua Barat Daya. 2. Menyusun daftar peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam percepatan pembangunan ruas jalan. 3. Mengintegrasikan pembangunan ruas jalan Susumuk–Bintuni dalam dokumen perencanaan daerah. 4. Memperkuat komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku adat di sepanjang trase jalan. 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres koordinasi dan kesiapan pembangunan. 6. Mendorong sinergi pembangunan jalan dengan program pengembangan ekonomi lokal. |
| <p>Dokumentasi</p> |  |

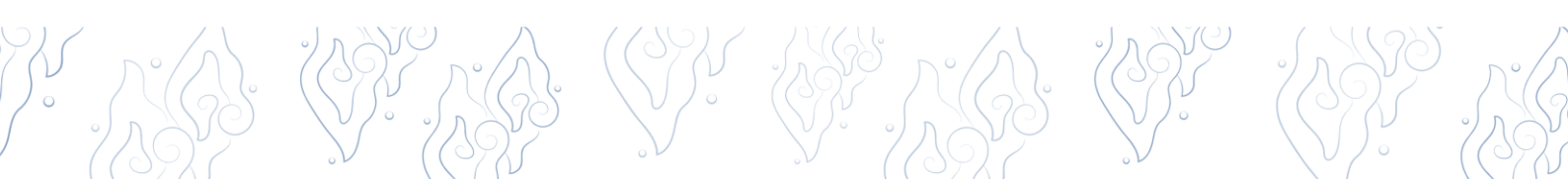


Kegiatan 17

| | |
|--|---|
| Nama Kegiatan | Audiensi dengan Tokoh Masyarakat Adat Kabupaten Maybrat |
| Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi) | Jum'at, 30 Januari 2026 di Sekretariat BPP PBD |
| Latar Belakang | <p>Pembangunan di wilayah konflik, khususnya Aifat Timur, merupakan persoalan yang memerlukan dukungan serta kajian khusus karena menyangkut aspek keamanan dan politis, tidak semata-mata bersifat teknokratik. Oleh karena itu, pertemuan koordinasi dengan para tokoh masyarakat adat menjadi penting guna menyerap aspirasi dan memperoleh dukungan sosial terhadap rencana pembangunan.</p> <p>Permasalahan ini muncul seiring adanya usulan dari masyarakat Aifat Timur Jauh agar rute jalan Susumuk–Bintuni dialihkan melalui arah Kampung Aikinging – Moskona Utara. Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan aspek keamanan di wilayah konflik serta adanya potensi sumber daya alam seperti emas dan batu bara di kawasan tersebut.</p> |
| Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan) | Mendapatkan saran dan masukan dari tokoh masyarakat adat terkait rencana pembangunan jalan Susumuk–Bintuni, khususnya menyangkut rute pembangunan dan aspek keamanan wilayah. |

| | |
|---|--|
| Peserta Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya 2. Tokoh Masyarakat Aifat Timur (Zakeus Momau, Sepnath Momau, dkk) 3. Anggota Pokja Papua Produktif BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya 4. Anggota Pokja Papua Damai, Virgianus Turot 5. Anggota DPRD Provinsi, Willem Asem |
| Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan | Koordinasi |
| Misi/Keterangan | Papua Produktif |
| Poin-Poin Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan rencana rute jalan Susumuk–Bintuni. 2. Pertimbangan aspek keamanan dalam pelaksanaan pembangunan jalan di wilayah konflik. 3. Aspirasi masyarakat terkait usulan alternatif rute melalui Kampung Aikinging – Moskona Utara. 4. Dukungan masyarakat adat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. |
| Hasil Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperoleh jaminan dukungan masyarakat terhadap pembangunan jalan Susumuk–Bintuni. 2. Masyarakat menyatakan bahwa proses ganti rugi adat sepanjang rute jalan tidak akan dipersulit. 3. Terdapat pemahaman bersama mengenai pentingnya mempertimbangkan aspek keamanan dalam penetapan rute pembangunan. |
| Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pertemuan dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua Barat guna menyampaikan rekomendasi agar pembangunan ruas Susumuk–Batas Kabupaten Maybrat tetap melalui rute Aifat Timur. 2. Memberikan saran kepada masyarakat Aifat Timur Jauh terkait usulan pembangunan jalan melalui Kampung Aikinging agar dapat diupayakan melalui sumber pendanaan lain, di luar APBN yang dikelola Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat. |

Dokumentasi



BAB IV

CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

4.1 Capaian

Selama periode Januari 2026, Badan Pengarah Papua Barat Daya telah melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) secara aktif dalam mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Capaian yang diperoleh meliputi:

1. Penguatan Koordinasi Lintas Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

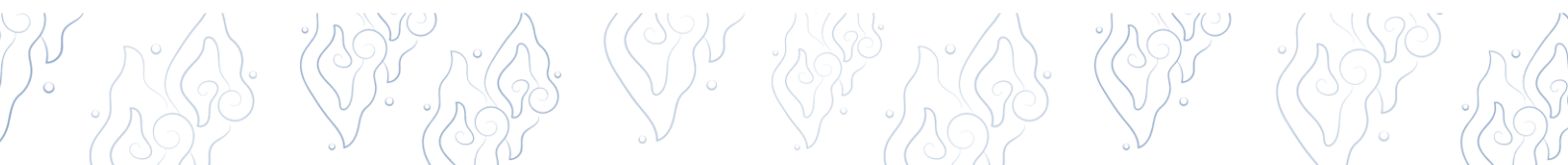
- a. Terlaksananya forum koordinasi bersama Gubernur, Walikota Sorong, DPRD, MRP, OPD terkait, serta lembaga vertikal (ATR/BPN, BPBPK, dll).
- b. Terbangunnya komitmen bersama dalam penyelesaian aset strategis daerah, khususnya terkait pembangunan RS Siloam.
- c. Terbentuknya kesepakatan dalam pembentukan tim kecil kajian tarif transportasi laut Sorong–Raja Ampat.

2. Pengawasan Aset Strategis Daerah

- a. Dilakukannya penelusuran status legalitas aset Kota Sorong.
- b. Tersusunnya langkah tindak lanjut percepatan pengurusan HPL dan legalisasi aset.
- c. Disepakatinya evaluasi berkala penyelesaian aset bersama ATR/BPN dan BPKAD.

3. Dukungan terhadap Misi Papua Sehat

- a. Evaluasi program Dinas Kesehatan Kota Sorong terkait indikator usia harapan hidup, stunting, dan malaria.
- b. Identifikasi kebutuhan penguatan SDM dan optimalisasi perencanaan pengadaan obat.
- c. Peninjauan PSC 119 dan rencana pelaksanaan Forum SHEK khusus untuk penguatan sistem kegawatdaruratan.



4. Dukungan terhadap Misi Papua Cerdas

- a. Partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan sebagai bentuk dukungan moral dan koordinatif terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- b. Terbangunnya jejaring dengan lembaga pendidikan dan komunitas alumni untuk kontribusi pembangunan daerah.

5. Dukungan terhadap Misi Papua Produktif

- a. Diseminasi studi kelayakan pelabuhan bersama Sorong Selatan–Maybrat sebagai dasar perencanaan logistik kawasan selatan.
- b. Koordinasi penguatan sektor pertanian melalui program Cetak Sawah Rakyat dan integrasi dengan MBG.
- c. Penguatan sinergi dengan pusat kajian ekonomi OAP untuk mendorong kebijakan berbasis riset.
- d. Terbangunnya komunikasi dengan sektor perbankan dalam rangka transformasi ekonomi dan penguatan pengelolaan dana daerah.

6. Penguatan Perencanaan Berbasis Data

- a. Diseminasi pemanfaatan DTSEN melalui aplikasi SEPAKAT
- b. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya integrasi data lintas sektor.

4.2 Permasalahan

Meskipun berbagai capaian telah diperoleh, terdapat sejumlah permasalahan yang masih memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut:

1. Permasalahan Legalitas dan Pengelolaan Aset

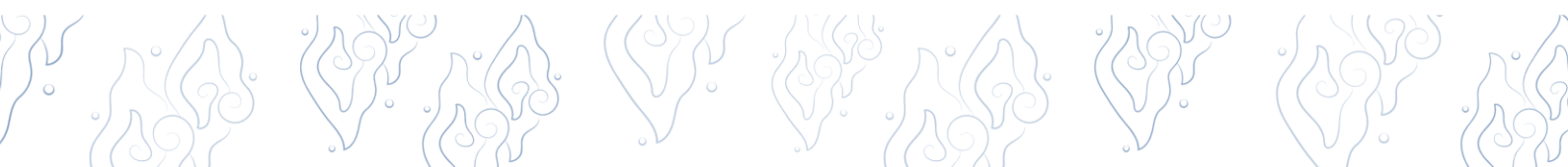
- a. Status hukum beberapa aset strategis belum memiliki kepastian.
- b. Terdapat aset yang telah diagunkan kepada pihak ketiga.
- c. Administrasi pertanahan dan pengurusan HPL belum sepenuhnya tuntas.

2. Keterbatasan Fiskal Daerah

- a. Keterbatasan APBD dalam mendukung pemenuhan SDMK, peningkatan layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
- b. Ketergantungan pada subsidi dan dukungan pihak ketiga.

3. Permasalahan Sektor Kesehatan

- a. Kekurangan SDM kesehatan.
- b. Ketergantungan program malaria pada NGO.



- c. Belum adanya regulasi PSC 119.
- d. Potensi ketidaktepatan perencanaan pengadaan obat.

4. Permasalahan Infrastruktur dan Logistik

- a. Infrastruktur pelabuhan dan konektivitas darat belum optimal.
- b. Tingginya biaya logistik akibat belum terintegrasinya sistem transportasi.
- c. Usulan program infrastruktur belum merata dari seluruh kabupaten/kota.

5. Permasalahan Ketahanan Pangan

- a. Kendala lahan pada program CSR.
- b. Kerusakan sistem drainase.
- c. Minimnya sarana pengolahan hasil pertanian.
- d. Kurangnya tenaga penyuluh dan minat generasi muda.

6. Tata Kelola Data dan Kelembagaan

- a. Integrasi data lintas sektor belum optimal.
- b. Kapasitas teknis aparatur masih perlu ditingkatkan.
- c. Belum terbangunnya sistem data ekonomi OAP yang terintegrasi.

4.3 Tantangan

Selain permasalahan teknis, terdapat tantangan strategis yang memerlukan pendekatan kebijakan jangka menengah dan panjang:

1. Penguatan Sinkronisasi Lintas Sektor

Mengatasi ego sektoral serta memperkuat koordinasi pusat–daerah.

2. Keberpihakan terhadap OAP

Memastikan setiap investasi dan kebijakan berdampak nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua.

3. Keberlanjutan Program Strategis

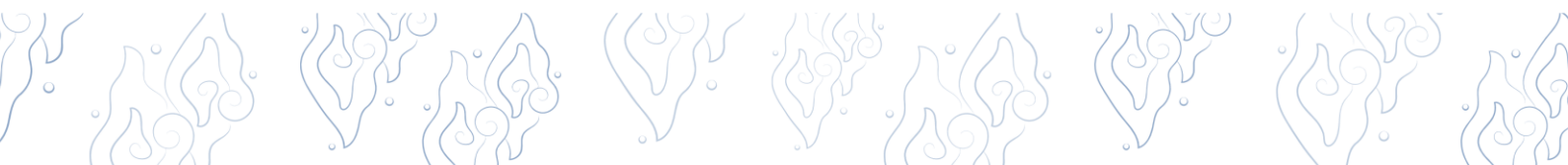
Membangun regulasi dan sistem agar program tidak berhenti akibat perubahan kebijakan atau kepemimpinan.

4. Transformasi Ekonomi Daerah

Diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal dan penurunan biaya logistik.

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Mendorong sistem pengawasan berbasis indikator RIPP dan data terpadu.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

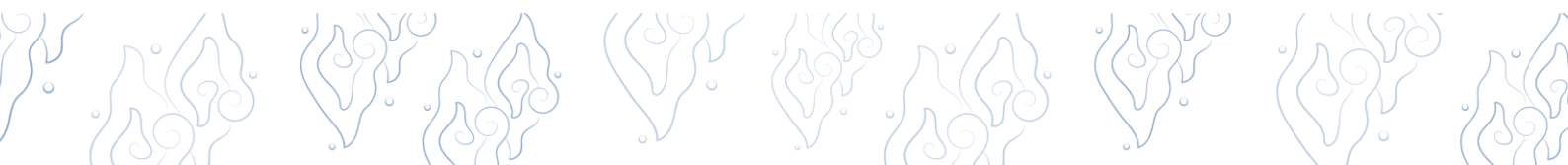
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode Januari 2026 menunjukkan bahwa peran Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) berjalan dengan baik dan memiliki posisi strategis dalam mengawal percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.

Berbagai capaian telah dihasilkan, antara lain:

1. Penguatan koordinasi lintas pemerintah dan pemangku kepentingan;
2. Pengawasan penyelesaian aset strategis daerah, khususnya yang berdampak pada sektor kesehatan dan pelayanan publik;
3. Dukungan terhadap pencapaian indikator Misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif;
4. Penguatan perencanaan berbasis data dan kolaborasi dengan lembaga riset;
5. Inisiasi transformasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor produktif dan konektivitas wilayah.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan struktural yang memerlukan penyelesaian bertahap, terutama terkait legalitas aset, keterbatasan fiskal daerah, penguatan kelembagaan, serta integrasi sistem perencanaan dan data. Tantangan ke depan menuntut konsistensi koordinasi, penguatan regulasi, serta keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Dengan demikian, pelaksanaan tugas Badan Pengarah tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga arah pembangunan agar tetap selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan prinsip keberlanjutan.



5.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas capaian, permasalahan, dan tantangan yang telah diidentifikasi, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Percepatan Penyelesaian Aset Strategis

- a. Memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN dan instansi terkait dalam pengurusan legalitas dan HPL.
- b. Melaksanakan monitoring berkala terhadap progres penyelesaian aset daerah.

2. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung

- a. Mendorong percepatan penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) terkait Dana Abadi.
- b. Menyusun regulasi pendukung (Pergub/Keputusan Kepala Daerah) dalam sektor transportasi, kesehatan, dan ketahanan pangan.

3. Penguatan Layanan Kesehatan dan SDM

- a. Menyusun perencanaan SDMK berbasis kebutuhan riil daerah.
- b. Mendorong integrasi dan penguatan PSC 119 melalui regulasi dan dukungan kelembagaan.

4. Penguatan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal

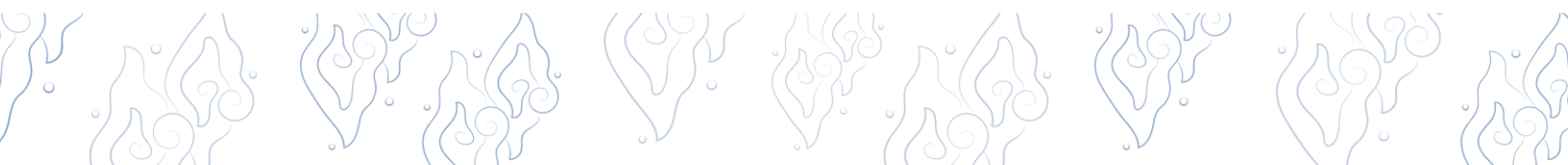
- a. Mengintegrasikan program MBG dengan rantai pasok pangan lokal.
- b. Mendorong pengembangan koperasi berbasis OAP dan penguatan sarana produksi pertanian.

5. Penguatan Perencanaan Berbasis Data

- a. Menjadikan DTSEN sebagai referensi utama dalam perencanaan sosial ekonomi.
- b. Membangun sistem data ekonomi OAP yang terintegrasi lintas sektor
- c. Mendorong percepatan penyusunan dokumen RAP.

6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi RIPP

- a. Menyusun mekanisme evaluasi berkala berbasis indikator misi.
- b. Memastikan setiap program memiliki ukuran kinerja yang terukur dan terdokumentasi.



5.3 Penutup

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Januari 2026 ini menjadi gambaran komprehensif atas dinamika pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus di wilayah Papua Barat Daya.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi:

1. Bahan evaluasi bagi pimpinan dan pemangku kepentingan;
2. Dasar pengambilan keputusan strategis;
3. Instrumen penguatan sinergi lintas sektor;

Serta pijakan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat Papua Barat Daya, khususnya Orang Asli Papua.

Ke depan, komitmen bersama, konsistensi koordinasi, serta penguatan tata kelola menjadi kunci dalam memastikan bahwa percepatan pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.